

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II

PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

2025

KATA PENGANTAR



Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan kinerja unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) Triwulan II Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Pusdatin mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan kinerja ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Pusdatin

selama Triwulan II Tahun 2025 atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara umum sasaran kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja Pusdatin selama Triwulan II tahun 2025, serta dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, sekaligus menjadi sarana evaluasi, sehingga dapat menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja demi mewujudkan *good governance* secara berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 18 Juli 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,



Abdurochman Indrajaya Sukma., S.Kom., M.Kom

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian dari pemerintahan, Badan POM mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka diperlukan dukungan dalam hal teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan obat dan makanan. Maka pada tahun 2025 Pusdatin menyusun 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu (1) Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, *Realtime*, dan Terintegrasi dan (2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Sasaran kegiatan Pusdatin didukung oleh 7 (tujuh) indikator kinerja utama dengan capaian sebagai berikut:

1. Nilai Indeks SPBE
2. Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi
3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
4. Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi
5. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
6. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi
7. Indeks Manajemen Risiko Pusat data dan Informasi

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025, Pusdatin memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp.44.521.934.000,--. Sampai dengan 30 Juni, Pusdatin telah mengalami 2 (dua) kali pemblokiran mandiri sebesar Rp.17.052.812.000,-- yang dilakukan pada 02 Desember 2024 dan 22 Februari 2025. Realisasi menurut aplikasi OM SPAN per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp12.241.804.293,-- atau 27,50%, sedangkan realisasi tanpa belanja pegawai sebesar Rp9.615.959.011,-- atau 24,35% serta realisasi anggaran dengan outstanding kontrak sebesar Rp21.216.652.456,-- atau 47,65%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Pusdatin dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

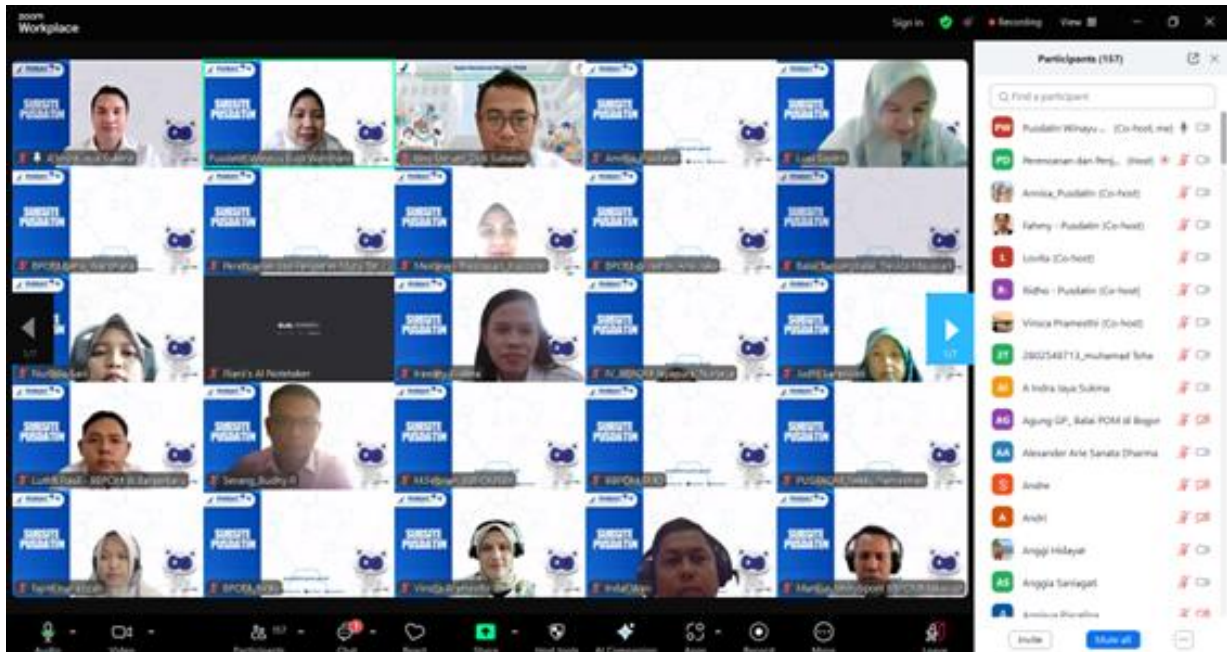
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	4
HIGHLIGHT KINERJA.....	5
BAB I.....	10
PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Gambaran Umum Organisasi	11
1.3 Struktur Organisasi	12
BAB II.....	13
PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Uraian Singkat Renstra	16
A. Visi.....	16
B. Misi	16
C. Tujuan	17
D. Sasaran Kegiatan	17
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	19
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	19
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	21
2.5 Pengukuran Kinerja.....	23
2.7 Pengukuran Efisiensi.....	25
BAB III.....	27
AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	79
3.3 Realisasi Anggaran	90
BAB IV	91
PENUTUP.....	91

HIGHLIGHT KINERJA

Selama triwulan II tahun 2025, terdapat capaian kinerja lain yang dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan kinerja Pusdatin antara lain:

1. Implementasi SPBE



Pusdatin Badan POM fokus memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pengembangan SDM, penyusunan kebijakan, dan penguatan layanan digital. Sosialisasi standar infrastruktur TIK dan aplikasi SPBE dilakukan untuk mendorong integrasi layanan di seluruh unit kerja. Pusdatin juga memfinalisasi Kebijakan Manajemen Pengetahuan SPBE, menyusun standar pelayanan TIK dan SLA untuk meningkatkan kualitas layanan.

Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPBE dilaksanakan melalui assessment mandiri serta tindak lanjut penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Penyusunan SOP Layanan SPBE dituntaskan, termasuk pendaftaran seluruh sistem elektronik Badan POM di portal PSE Kominfo sesuai ketentuan nasional. Di bidang aplikasi, dari total 36 usulan pengembangan, sejumlah aplikasi strategis telah disetujui untuk dikembangkan sesuai Peta Rencana SPBE.

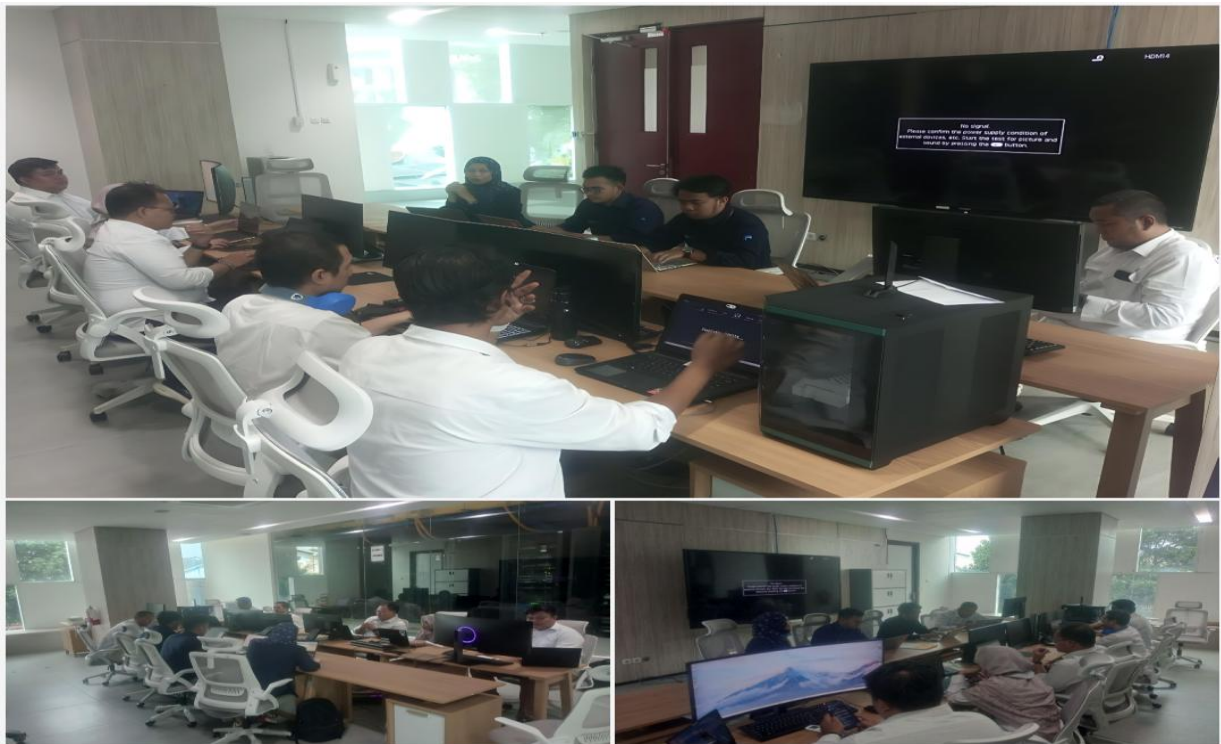
Pusdatin turut menerbitkan rekomendasi pengadaan perangkat kerja (APD) sesuai standar teknis yang berlaku. Dari sisi keamanan informasi, audit internal ISO 27001:2022 berjalan baik tanpa temuan mayor maupun minor. Penerapan ISO 37001:2016 untuk sistem anti-penyuapan juga diperkuat melalui sosialisasi dan evaluasi internal. Seluruh upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pusdatin dalam mendukung transformasi digital Badan POM secara berkelanjutan.

2. Dukungan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Badan POM



Dalam rangka mendukung SPLP di Badan POM, Pusdatin melaksanakan konsolidasi data RHPK, dan pembahasan pengelolaan big data bersama Peruri. Hasilnya menyoroti perlunya harmonisasi master data, verifikasi aliran data, serta optimalisasi teknologi ETL dan CDC (*change data capture*) untuk menyempurnakan alur pertukaran data lintas sistem. Progres pengembangan Portal Satu Data Tahun 2025 telah mencapai 50%, dengan penguatan keamanan sebagai tindak lanjut dari VA, perubahan sistem login menjadi SSO dengan SIASN, serta pengelolaan API untuk memastikan *traceability* serta keterbukaan informasi. Kegiatan manajemen data menjadi salah satu aspek pendukung dalam implementasi SPLP dan Satu Data Indonesia dimana saat ini berfokus pada kegiatan mereviu dan menyusun pedoman serta SOP mikro dan makro berdasarkan rekomendasi SDI. Selain itu, kegiatan EPSS bersama BPS juga dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Badan POM dalam memperkuat kualitas statistik sektoral Badan POM melalui bimtek pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta penyusunan metadata untuk indikator prioritas RPJMN 2025–2029 bersama produsen data terkait. Data yang dihasilkan kemudian dibagipakaikan sesuai kegiatan layanan data terbuka dengan ikut serta dalam penyusunan data prioritas serta pembuatan dan *updating dashboard* di Badan POM Command Center.

3. Percepatan Integrasi Layanan Digital Pemerintah



Dalam rangka upaya percepatan integrasi layanan digital pemerintah melalui pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam ekosistem Pusat Data Nasional (PDN), telah dilaksanakan rapat konfirmasi antara Pusdatin Badan POM dan Direktorat Komunikasi Digital (Komdigi) Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Rapat dimulai pada tanggal 14 Mei 2025. Rapat ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi teknis dan menyelaraskan pemahaman antara Badan POM dan KOMDIGI terkait pemanfaatan JIP dan SPLP sebagai bagian dari infrastruktur layanan SPBE nasional. Adapun pokok bahasan dalam rapat meliputi: (1) Pemanfaatan JIP; (2) Instalasi JIP; (3) Integrasi SPLP; (4) Koordinasi dan Komunikasi Teknis; serta (5) Kolaborasi Pusdatin dan KOMDIGI. Selain memberikan tanggapan atas isu-isu yang disampaikan, tim Komdigi juga menyampaikan arahan strategis dan rekomendasi teknis sebagai bagian dari langkah bersama dalam mewujudkan interoperabilitas layanan pemerintah yang aman, efisien, dan berstandar nasional.

4. Koordinasi Tim CSIRT (*Cyber Security Incident Response Team*)



Tim Keamanan TIK dan Persandian menyelenggarakan Pertemuan Rapat Koordinasi Tim CSIRT (*Cyber Security Incident Response Team*) Badan POM di Tahun 2025. Dalam pertemuan Koordinasi Tim CSIRT ini disampaikan kembali tugas Tim CSIRT (TTIS) Badan POM, antara lain seperti: Pemberian peringatan adanya serangan siber, Penanggulangan dan pemulihan insiden siber, Penanganan kerentanan celah keamanan siber dan layanan manajemen kualitas keamanan (analisis risiko serta edukasi dan pelatihan). Ancaman umum serangan siber yang biasa terjadi seperti: SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Insecure Deserialization dan Cross-Site Request Forgery (CSRF). dihadiri oleh perwakilan Unit Kerja Pusat, Balai Besar/ Balai POM, dan Loka POM seluruh Indonesia.

Acara ini diselenggarakan di Gedung Batik Lantai 6, Badan POM dan melalui aplikasi zoom meeting pada tanggal 14 Mei 2025. Acara dibuka oleh Bapak Kepala Pusdatin, Bapak Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom, M.Kom. Dalam sambutannya, Bapak Kepala Pusdatin menyampaikan agar bersama-sama kita mengidentifikasi celah keamanan pada aplikasi sistem informasi kita. Sejak Januari sampai dengan Maret 2025, Pusdatin mencatat ada 5 (lima) insiden serangan siber yang cukup signifikan. Kerentanan keamanan tidak ditembus pada sisi yang paling kuat, tapi di sisi yang paling lemah. Oleh karena itu Informasi seperti ini agar juga sampai ke pimpinan untuk *aware* terhadap keamanan informasi kita semua.

5. Integrasi Aplikasi



JW 2

Keberagaman sistem informasi masih menjadi poin yang berperan penting dalam integrasi aplikasi baik subsistem dan supra sistem, beberapa kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain SSO (*Single Sign On*) yang mana menjadi solusi akan fragmentasi akses, di mana setiap sistem informasi memiliki mekanisme otentikasi tersendiri, yang menyebabkan pengguna harus mengingat banyak akun dan kata sandi untuk mengakses layanan yang berbeda. Hal ini tidak hanya menyulitkan pengguna, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan siber seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau duplikat, serta sulitnya melakukan pengelolaan akun pengguna secara terpusat.

Kegiatan dalam integrasi antar supra sistem yang lain yang dilakukan triwulan kedua ini adalah *Integrasi Indonesia Single Risk Management (ISRM)* antara LNSW (Lembaga Nasional *Single Window*) dengan Exim (*export import*) Badan POM, Integrasi SMARTPOM Badan POM ke SIKD-NG Kementerian Keuangan, selain kegiatan dalam pengintegrasian sistem atau aplikasi juga dilakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan kelancaran dalam integrasi antara lain adalah money TTE dan money OSS.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebagai instansi pemerintahan tentunya mendukung penuh implementasi SPBE, dengan melakukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang meliputi media, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan oleh Badan POM. Badan POM juga memiliki aplikasi layanan publik yang disebut sebagai "Portal Layanan Publik Badan POM" yang bersifat citizen-centric atau berfokus pada pengguna. Aplikasi ini mencakup berbagai layanan seperti pencarian produk, pengaduan, pengecekan nomor registrasi, serta laporan terkait pengawasan obat dan makanan. Portal ini adalah wujud nyata dari Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan yang terintegrasi, memungkinkan berbagai stakeholder untuk berkontribusi dalam pengawasan secara digital. Melalui aplikasi ini, Badan POM berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan keamanan produk yang beredar di Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, peran dan kegiatan prioritas Satu Data Indonesia (SDI) diarahkan untuk memperkuat tata kelola data nasional guna mendukung pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Beberapa kegiatan prioritas tersebut meliputi penguatan regulasi SDI sebagai landasan hukum dan kelembagaan, pembangunan Open Data Indonesia yang juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam proses akses ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta menjadikan SDI sebagai elemen penting dalam Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Selain itu, SDI juga berperan dalam sinkronisasi indikator antara pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan lebih terkoordinasi, serta bertindak sebagai integrator data untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan informasi lintas sektor.

Sejalan dengan arah tersebut, Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi menggambarkan arsitektur sistem yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan obat dan makanan secara digital, dengan memanfaatkan teknologi terkini, termasuk analitik, machine learning, dan data science. Sistem ini menggunakan Big Data Badan POM yang dihubungkan dengan berbagai aplikasi dan alat analisis, termasuk aplikasi dari instansi lain (KL/LD) serta dashboard untuk memantau dan menganalisis data. Layanan ini diakses oleh berbagai pihak, seperti pelaku usaha, pegawai Badan POM, pimpinan, dan masyarakat melalui portal publik, aplikasi mobile, dan website Badan POM. Proses pengawasan mencakup registrasi produk (pre-market), pengawasan (post-market), serta pengelolaan data

pengujian obat dan makanan. Sistem ini terintegrasi dengan infrastruktur teknologi informasi, meliputi jaringan, server, storage, dan pusat data nasional untuk mendukung pengawasan yang efisien dan efektif.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan II Tahun 2025, Pusdatin menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pusdatin, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan POM, tugas Pusdatin adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan internal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan internal dan informasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan eksternal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan eksternal dan integrasi dan interkoneksi sistem informasi;
4. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data dan informasi meliputi arsitektur dan layanan berbagi pakai data dan informasi;
5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola standar kebijakan, penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi standar teknologi informasi dan komunikasi; dan
6. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi penanganan insiden dan pemenuhan maturitas insiden keamanan siber.

Dilihat dari tugas dan fungsi Pusdatin secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kegiatan prioritas Pusdatin di tahun 2025, yakni:

1. Implementasi peta rencana SPBE;
2. Pengembangan Portal *Single Sign On* (SSO) dan integrasi aplikasi pengawasan obat dan makanan; dan
3. Penyiapan SDM untuk menggunakan *tools microservices*.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusdatin, Kepala Pusdatin dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat struktural sebagai Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 5 (lima) ketua tim selaku pelaksana, 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 4 (empat) Pranata Komputer Madya, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdatin

1.4 Isu Strategis

1. Kebijakan & Regulasi

Terdapat berbagai regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menegaskan legalitas informasi elektronik serta tanggung jawab perlindungan data dan sistem elektronik. Sejalan dengan itu, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat urgensi pengelolaan dan perlindungan data pribadi yang aman dan akuntabel dalam lingkup pelayanan publik berbasis digital. Dalam konteks tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE mendorong integrasi sistem pemerintahan melalui pendekatan sistemik, efisien, dan berorientasi layanan.

Sesuai dengan amanat Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat tiga tujuan utama SPBE, yaitu:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- 3) Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Pencapaian semua tujuan tersebut merupakan perwujudan dari kondisi ideal di mana pemerintah dengan dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat, dunia usaha, maupun layanan antar lembaga pemerintahan. Tidak terkecuali BPOM, secara umum, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menganut prinsip-prinsip dasar sebagai pemicu kesuksesan implementasi SPBE. Merujuk pada hasil Evaluasi Indeks SPBE BPOM Tahun 2023, menunjukkan bahwa strategi peningkatan Indeks SPBE yang perlu dituju yakni dengan meningkatkan seluruh domain yang meliputi: kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE agar dapat mencapai target level 4 (empat). Hal ini diperkuat dengan Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional yang memberikan kerangka arsitektur digital terpadu untuk mendukung interoperabilitas dan efisiensi layanan publik. Lebih jauh, Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menetapkan kebijakan standarisasi data lintas sektor, termasuk dalam pengawasan obat dan makanan. Terkait aspek keamanan siber, Perpres No. 47 Tahun 2023 menetapkan strategi nasional dan manajemen krisis siber yang menjadi landasan penting dalam menjaga integritas sistem dan data BPOM. Seluruh kebijakan tersebut semakin diperkuat dengan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menuntut seluruh instansi, termasuk BPOM, untuk mengakselerasi transformasi digital secara terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung layanan publik yang lebih adaptif, aman, dan berkualitas.

2. *People-Process-Technology*

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusdatin BPOM mengidentifikasi isu strategis yang berfokus pada aspek *People-Process-Technology* sebagai dasar penguatan transformasi digital di lingkungan BPOM. Dari sisi *People*, masih terdapat kebutuhan khususnya dalam meningkatkan literasi digital serta pengembangan talenta dengan keterampilan baru yang relevan. Dari sisi *Process*, simplifikasi proses bisnis menjadi keharusan untuk menciptakan alur kerja yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pengawasan obat dan makanan. Lebih jauh, dari sisi *Technology*, tantangan utama terletak pada kemampuan mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru ke dalam sistem eksisting yang beragam dan kompleks. Oleh karena itu, Pusdatin juga mendorong penguatan Layanan Keterpaduan Badan POM yang berfokus pada pendekatan *citizen centric*, sehingga sistem yang dibangun tidak hanya terintegrasi secara teknis, namun juga memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan kepada masyarakat sebagai pengguna utama.

3. Budaya Keamanan Siber

Meningkatnya risiko serangan siber dan potensi kebocoran data menuntut penguatan sistem pertahanan siber yang adaptif dan responsif terhadap ancaman yang semakin kompleks. Selain itu, kebutuhan akan ketersediaan data yang tinggi dan konsisten, termasuk dukungan infrastruktur dan sistem informasi yang andal, menjadi faktor krusial dalam menjamin kelangsungan layanan pengawasan obat dan makanan. Selain itu, kondisi data yang masih terfragmentasi dan tersebar di berbagai sistem menjadi tantangan yang dihadapi Pusdatin dalam mengintegrasikan data. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan budaya keamanan siber yang kuat dan terinternalisasi di seluruh unit kerja guna memastikan perlindungan data, keamanan sistem, serta peningkatan tata kelola informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terpercaya.

4. Budaya Data

Budaya data menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk membangun tata kelola data yang efektif guna menjamin keamanan, kualitas, dan aksesibilitas data yang digunakan dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pusdatin menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan privasi data dengan kebutuhan untuk membuka akses informasi secara luas bagi pihak yang berwenang dan berkepentingan. Selain itu, integrasi data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, menjadi keharusan agar pengambilan keputusan berbasis data dapat berjalan secara menyeluruh dan akurat. Namun, upaya ini dihadapkan pada tantangan terutama dalam membangun platform data yang terpadu, aman, dan mudah diakses oleh pengguna. Oleh karena itu, penguatan budaya data di lingkungan BPOM tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga perubahan pola pikir, kolaborasi lintas unit, serta penegakan kebijakan tata kelola data secara konsisten dan berkelanjutan.

5. Kerjasama (Keterlibatan *Stakeholder*)

Adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal seperti: unit kerja di lingkungan BPOM, maupun eksternal, seperti: kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat masih menjadi isu strategis dalam Pusdatin BPOM. Kolaborasi yang kuat diperlukan untuk memastikan aliran data yang akurat, terkini, dan relevan guna mendukung pengambilan keputusan. Namun demikian, Pusdatin juga menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data, terutama terkait dengan aspek transparansi, perlindungan data, serta keterbukaan informasi. Oleh karena itu, peningkatan sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan, disertai dengan kebijakan pengelolaan data yang akuntabel dan transparan, menjadi langkah krusial dalam menjawab isu strategis ini.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

A. Visi

Badan POM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029, visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Badan POM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung Badan POM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi Badan POM merupakan komitmen Pusdatin dalam perannya sebagai unit pendukung Badan POM dalam hal pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pengawasan obat dan makanan.

B. Misi

Misi Badan POM untuk mencapai visi Badan POM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Berdasarkan misi BPOM diatas dan fungsi strategis Pusdatin di bidang infrastruktur TIK, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi, berikut adalah rumusan misi Pusdatin yang selaras dan dicantumkan dalam Misi BPOM Nomor 4, yaitu: **"Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan"**.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Badan POM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025–2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menangani secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi Badan POM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Badan POM untuk periode 2025-2029, sebagai berikut.

- 1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
- 2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
- 3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
- 4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan
- 5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, tujuan pelaksanaan kegiatan dan program kerja Pusdatin selaras dengan Tujuan BPOM Nomor 5, yaitu: **“Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima”**. Penetapan tujuan Pusdatin merupakan upaya untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam arah strategis yang terukur. Tujuan ini disusun sebagai landasan bagi perencanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta tata kelola data dan informasi yang andal guna mendukung efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

D. Sasaran Kegiatan

Terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab dari Pusdatin yaitu:

1. SK.01. ***“Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi”***.

Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan data yang akurat, terkini, dan terintegrasi. Sistem informasi pengawasan yang real-time juga mendukung ketepatan tindakan, serta mencegah potensi bahaya bagi masyarakat. Terdapat 3 (tiga) IKU yang mendukung Sasaran Kegiatan ini, yaitu :

a. Nilai Indeks SPBE

SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Penilaian evaluasi indeks SPBE BPOM dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- b. Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, dan Terintegrasi

Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang andal dan terintegrasi mengacu pada ukuran seberapa efektif data dan sistem informasi yang digunakan dalam pengawasan obat-obatan, makanan, dan produk terkait lainnya, untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, lengkap, dan dapat diandalkan, serta sistem informasi yang digunakan terhubung dan terkoordinasi dengan baik.

- c. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga.

2. SK.02 *“Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan”*.

Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi tata kelola internal Pusdatin. Optimalisasi tata kelola diperlukan agar penyelenggaraan fungsi kelembagaan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip good governance, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi. Terdapat 4 (empat) IKU yang mendukung Sasaran Kegiatan ini, yaitu :

- a. Nilai Pembangunan ZI

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi dalam menerapkan reformasi birokrasi untuk mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi berhasil membangun sistem dan budaya kerja yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

- b. Nilai AKIP

Nilai AKIP adalah nilai yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, yang merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi telah berhasil menerapkan SAKIP dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

- c. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA).

d. Indeks Manajemen Risiko

Indeks Manajemen Risiko adalah ukuran kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, dan semakin tinggi nilainya, semakin baik penerapan manajemen risiko tersebut

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Pusdatin kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 disusun sebelum DIPA awal TA 2025 pada tanggal 20 September 2024. Sasaran strategis dan indikator kinerja Pusdatin ditunjukkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi, dengan Indikator sasaran:

- 1) Nilai Indeks SPBE sebesar 4.59
- 2) Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal sebesar 20%
- 3) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2.8

2. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, dengan indikator sasaran:

- 1) Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi sebesar 86.52
- 2) Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi sebesar 81.88
- 3) Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi sebesar 97.47
- 4) Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi sebesar 2.94

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja tanggal 12 Februari 2025. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan unit untuk memantau kinerja secara berkala dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4.59 Nilai
		Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal	20%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.8 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97.47 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Nilai

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Telah dilakukan perubahan target triwulanan terhadap rencana aksi perjanjian kinerja pada indikator Indeks SPBE sebanyak satu kali, rencana aksi **sebelum** dilakukan perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran	
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.59	25.785.944.000	
		Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.934.400.000
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.266.266.000
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.52	106.533.000	
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.88	1.194.499.000
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.47	10.082.714.000
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.94	151.578.000
Total															44.521.934.000	

Pada tanggal 15 April 2025 dilakukan perubahan pada target triwulan Indeks SPBE, rencana aksi **setelah** dilakukan perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran	
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.59	25.785.944.000	
		Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.934.400.000
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.266.266.000
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.52	106.533.000	
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.88	1.194.499.000
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.47	10.082.714.000
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.94	151.578.000
Total															44.521.934.000	

2.5 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini mengacu pada Surat Edaran Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran) dan tahunan sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

a. Syarat Pengukuran Kinerja:

- 1) Terdapat Perjanjian Kinerja;
- 2) Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
- 3) Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
- 4) Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja;
- 5) Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- 6) Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
- 7) Sumber data yang valid dan mudah telusur.
- 8) Dukungan sistem informasi

b. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1) Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- a) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- b) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

2) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

c. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
- 2) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- 3) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e-Performance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- 4) Pimpinan Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - a) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - b) reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - c) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- 5) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

2.6 Nilai Kinerja Organisasi

a. Jenis Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

1) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

2) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

a) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil

evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

b. Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

PREDIKAT	NKO	NOTIFIKASI WARNA
Istimewa	$> 100\%$	Biru
Baik	$80\% < X \leq 100\%$	Hijau
Butuh Perbaikan	$60\% < X \leq 80\%$	Kuning
Kurang	$20\% < X \leq 60\%$	Orange
Sangat Kurang	$0\% \leq X \leq 20\%$	Merah

2.7 Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
$0 - 0,2$	100% (efisien)
$0,21 - 0,4$	95% (efisien)
$0,41 - 0,6$	92% (efisien)
$0,61 - 0,8$	90% (efisien)
$0,81 - 1,0$	88% (efisien)
$1,01 - 1,2$	86% (tidak efisien)
$1,21 - 1,4$	84% (tidak efisien)
$1,41 - 1,6$	80% (tidak efisien)
$1,61 - 1,8$	78% (tidak efisien)
$> 1,81$	75% (tidak efisien)

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) bulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Pusdatin adalah sebagai berikut:

- a. Adanya SOP Pengumpulan Data Kinerja Pusdatin yang telah disahkan oleh Kepala Pusdatin pada tanggal 05 Juni 2020 dan dilakukan revisi ketiga pada tanggal 20 Januari 2023;
- b. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Pusdatin yang disahkan oleh SK Kepala BPOM;
- c. Kepala Pusdatin menunjuk perwakilan penanggung jawab data disetiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Pusdatin;
- d. Penanggungjawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggung jawab data Pusdatin; dan
- e. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, matriks RKP (bit.ly/capaianpusattahun2025), Simetris RHPK dan Simetris e-performance serta monev Bappenas.

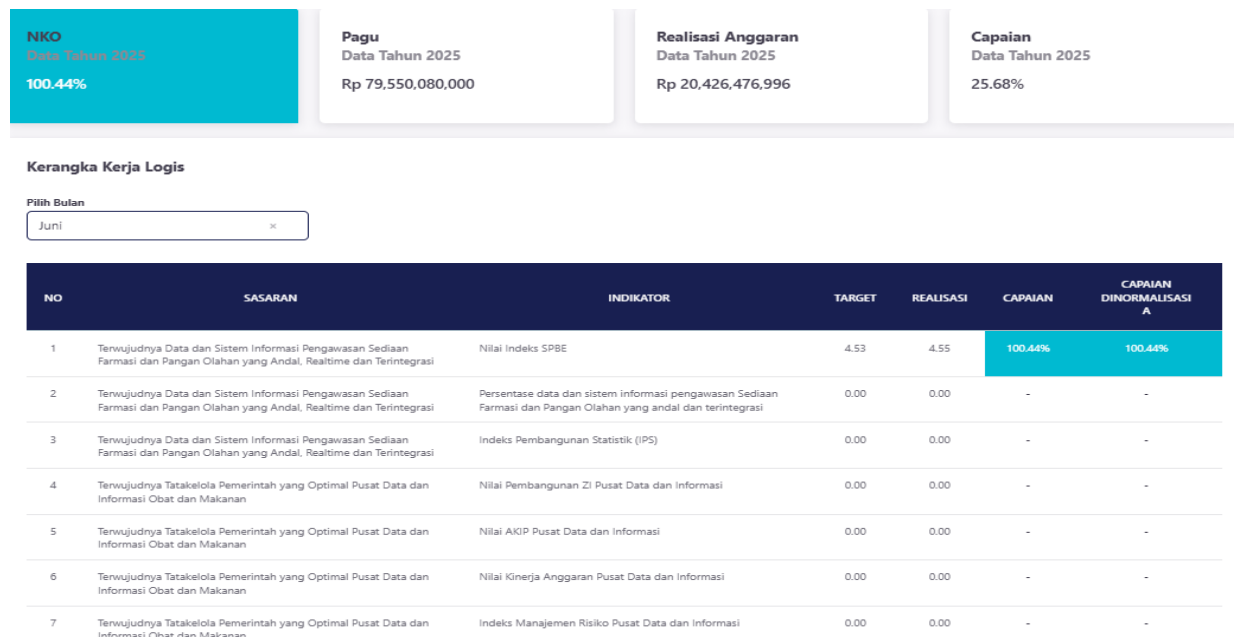
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan di Pusdatin untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan II tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sementara sebesar 100.44 % dengan kriteria **ISTIMEWA**. Hasil tersebut merupakan evaluasi terhadap 1 (satu) sasaran kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, serta evaluasi terhadap 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) dari 6 (enam) IKU yang harus dievaluasi. Indikator lainnya belum dapat dievaluasi dikarenakan menunggu penilaian dari Unit Kerja lain dan/atau dari Kementerian/Lembaga lain yang hasilnya di dapatkan pada akhir tahun 2025. NKO dan capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2025 Pusdatin memiliki 2 (Dua) sasaran kegiatan dan 7 (Tujuh) IKU, masing-masing sasaran kegiatan dan IKU akan diukur capaian kinerjanya. Berikut data capaian di setiap IKU dan sasaran kegiatan pada triwulan II (April-Juni):

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi Tahunan	Realisasi TW II	Capaian TW II (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria terhadap Capaian Tahunan
Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4,59	4,53	-	4,55	100.44%	98,7%	Baik
	Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20%	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan
	Indeks Pembangunan statistik (IPS)	2,8	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan
Terwujudnya Tatakala Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,52	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan
	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,88	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97,47	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,94	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya tercapai dengan kriteria **SANGAT BAIK**, dan 6 (enam) indikator kinerja yang realisasi kinerjanya belum tercapai dengan kriteria **BELUM DAPAT DITENTUKAN**. Kriteria **SANGAT BAIK** menunjukkan bahwa target triwulan II tahun 2025 melampaui target triwulan. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pusdatin, dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi

INDEKS SPBE

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kerja	Target	Realisasi TW II	Capaian (%)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Indeks SPBE	4.59	4.55	98,69%	Baik	Efektif

Telah ditetapkan target sebesar 4,59 pada akhir tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II sebesar 4,55, maka telah tercapai kinerja sebesar 98,69 % dengan kriteria **"BAIK"**.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Indeks SPBE	Target	4.53	4.53	4.53	4.59
	Realisasi	4.53	4.55	-	-

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan pada akhir triwulan II, realisasi Nilai Indeks SPBE telah dicapai sebesar 4,55. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan II sebesar 4,55 maka telah tercapai capaian kinerja 100.44%, dan mencapai kriteria **"SANGAT BAIK"**.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	2.57	2.91	113.23%	Sangat Baik
2022	3.10	3.12	100.64%	Memenuhi Ekspektasi
2023	3.30	4.08	123.64%	Tidak dapat disimpulkan
2024	4.10	4.53	110.48%	Sangat baik

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB. Penilaian akan dilakukan pada triwulan IV 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Implementasi SPBE di Lingkungan Badan POM

Penguatan implementasi SPBE di lingkungan Badan POM didukung oleh adanya komitmen manajemen serta pelaksanaan rapat, diskusi teknis, dan pengembangan kapasitas SDM secara rutin. Alternatif solusi yang diterapkan untuk mendukung keberhasilan ini adalah penyusunan materi pembelajaran SPBE yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan riil di lapangan, guna mempercepat peningkatan kompetensi ASN.

b. Sosialisasi Standar Sistem Informasi dan Standar Infrastruktur TIK

Dalam meningkatkan pemahaman unit kerja terhadap standar TIK dan aplikasi SPBE dicapai melalui sosialisasi langsung kepada 180 peserta dari berbagai unit. Untuk mengatasi berbagai kendala teknis yang muncul di lapangan, solusi yang dilakukan adalah mengumpulkan masukan selama kegiatan sosialisasi yang selanjutnya dijadikan bahan perbaikan dalam implementasi kebijakan dan penyempurnaan standar.

c. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengetahuan SPBE

Penyusunan kebijakan manajemen pengetahuan SPBE tidak terlepas dari keterlibatan aktif berbagai unit seperti PPSDM, Biro SDM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Sebagai solusi untuk mempercepat proses penyusunan, Pusdatin memanfaatkan mekanisme reviu lintas unit dan permintaan persetujuan verbal melalui Nota Dinas sebagai upaya percepatan finalisasi kebijakan.

d. Assessment Mandiri Indeks SPBE

Dalam pelaksanaan assessment mandiri indeks SPBE dipengaruhi oleh konsistensi monitoring dan evaluasi internal terhadap penerapan SPBE dan ketersediaan data dukung. Solusi yang diambil untuk menjaga kesinambungan evaluasi adalah dengan melakukan assessment mandiri secara berkala guna mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan perbaikan lebih cepat.

e. Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE didukung oleh proses koordinasi intensif dengan Biro Hukum dan Organisasi, serta keterlibatan pimpinan unit kerja pusat. Untuk mempercepat pengesahan, solusi yang dilakukan adalah menjadwalkan Rakorpim sebagai forum penyamaan pemahaman antar pimpinan terkait arah kebijakan SPBE.

f. Reviu SOP Makro dan Mikro Layanan SPBE

Penyusunan dan finalisasi SOP Mikro di lingkungan pusat data dan informasi obat dan makanan berhasil diselesaikan karena adanya pengelolaan dokumen yang tertib dan terstandar. Solusi alternatif yang dilakukan agar

proses berjalan lancar adalah dengan melibatkan Biro Hukum dan Organisasi dalam reviu Draft SOP Makro sehingga dokumen yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan internal.

g. Pendaftaran Sistem Elektronik

Dalam memenuhi kewajiban pendaftaran sistem elektronik BPOM di PSE Komidigi didukung oleh kesiapan admin unit kerja serta pengelolaan proses pendaftaran secara bertahap. Solusi yang diterapkan adalah membagi pendaftaran ke dalam dua tahap agar prosesnya lebih terkelola dan memastikan setiap unit mendapatkan akses sesuai ketentuan.

h. Pemenuhan Standarisasi Sistem Informasi

Pengelolaan pengajuan pengembangan aplikasi disebabkan oleh penggunaan Peta Rencana SPBE sebagai acuan dalam analisis aplikasi, sehingga mencegah duplikasi dan memastikan keterpaduan sistem. Solusi yang diterapkan adalah melibatkan unit pemilik aplikasi dalam proses reviu dan diskusi teknis guna memastikan pengembangan sesuai prioritas dan kebutuhan strategis BPOM.

i. Pemenuhan Rekomendasi Alat Pengolah Data (APD)

Dalam pengendalian pengadaan APD dicapai melalui reviu teknis yang sistematis sesuai standar infrastruktur TIK. Sebagai solusi, setiap permohonan pengadaan dianalisis berdasarkan standar teknis dan kebijakan aset, guna memastikan perangkat yang diadakan benar-benar sesuai kebutuhan dan mendukung operasional digital.

j. Standarisasi dan SLA Layanan TIK

Penyusunan SLA untuk 21 layanan TIK didukung oleh pembahasan parameter layanan dan revisi standar penyelesaian keluhan layanan secara berkala. Untuk meningkatkan kualitas layanan, solusi yang diterapkan adalah pembaruan waktu layanan, penyesuaian istilah layanan, dan integrasi monitoring tools dalam aplikasi layanan internal.

k. Audit Internal ISO 27001:2022

Pelaksanaan audit internal ISO 27001:2022 tanpa temuan mayor atau minor menunjukkan komitmen terhadap sistem keamanan informasi. Sebagai langkah solutif, awareness dan reviu dokumen terus dilakukan secara berkala untuk mempertahankan standar yang ada dan memanfaatkan peluang perbaikan (OFI) yang ditemukan selama audit.

l. Implementasi ISO 37001:2016 (Anti Penyuapan)

Penerapan sistem manajemen anti-penyuapan tercapai melalui awareness dan evaluasi internal yang rutin. Menghadapi keterbatasan anggaran untuk audit eksternal, solusi yang dilakukan adalah tetap melaksanakan audit

internal dan evaluasi konteks organisasi guna memastikan sistem anti-suap tetap berjalan optimal.

m. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Kegiatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di BPOM didasarkan pada Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan menjadi salah satu aspek dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE pada Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan yang mendukung SPLP di BPOM pada triwulan 2 adalah evaluasi penilaian SDI BPOM Tahun 2023, konsolidasi data RHPK, dan pembahasan pengelolaan big data bersama Peruri. Hasilnya menyoroti perlunya harmonisasi master data, verifikasi aliran data, serta optimalisasi teknologi ETL dan CDC untuk menyempurnakan alur pertukaran data lintas sistem. Progres pengembangan Portal Satu Data Tahun 2025 telah mencapai 50%, dengan penguatan keamanan sebagai tindak lanjut dari VA, perubahan sistem login menjadi SSO dengan SIASN, serta pengelolaan API untuk memastikan *traceability* serta keterbukaan informasi.

n. Manajemen data

Manajemen data merupakan kegiatan yang mendukung pengelolaan data di lingkungan BPOM sesuai amanah dari SPBE dan Satu Data Indonesia yang kemudian dibuat kebijakan pedoman manajemen data di lingkungan BPOM (Kepka BPOM No. 16 Tahun 2024). Kegiatan manajemen data di triwulan 2 berfokus pada kegiatan mereview dan menyusun pedoman serta SOP mikro dan makro berdasarkan rekomendasi SDI. Selain itu, kegiatan EPSS bersama BPS juga dilaksanakan sebagai bentuk komitmen BPOM dalam memperkuat kualitas statistik sektoral melalui pelatihan GSBPM dan penyusunan metadata untuk indikator prioritas RPJMN 2025–2029.

o. Layanan Data terbuka

Layanan data terbuka merupakan kegiatan penyajian serta pemanfaatan data dan informasi. Salah satunya adalah BPOM Command Center (BCC). BCC menyajikan visualisasi data dan informasi untuk kebutuhan pimpinan dalam mendukung pembuatan kebijakan dengan memberikan kemudahan melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh proses bisnis di Badan POM secara komprehensif dan real time dalam bentuk dashboard. Data dan informasi yang disajikan berasal dari unit kerja di BPOM yang kemudian diolah dan divisualisasi sesuai kebutuhan organisasi. Pada triwulan 2 ini telah mengikuti serial Workshop Gotong Royong Data (WGRD) Tahun 2025 yang bertujuan untuk menyusun dan menyepakati Data Prioritas. Jika sebelumnya Data Prioritas disusun setiap tahun, mulai tahun 2025 penyusunannya akan dilakukan untuk jangka waktu lima tahun, sejalan dengan periode RPJMN. Oleh karena itu, daftar indikatif yang diberikan oleh Bappenas mencakup periode 2025–2029. Selain itu, dilaksanakan rapat pembahasan usulan data

prioritas BPOM tahun 2025 yang dilaksanakan pada 10 Juni 2025 merupakan tindak lanjut dari pembukaan serial WGRD, dalam rapat ini dibahas penetapan dan penyusunan data prioritas yang menjadi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik sesuai arahan RPJMN 2025–2029. Data prioritas ini meliputi indikator-indikator strategis BPOM yang mencakup berbagai komoditas seperti pangan, obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk tembakau, dengan sumber utama data berasal dari sistem internal BPOM. Dalam mendukung prinsip SPLP, upaya integrasi aliran data dari berbagai unit dan sumber di BPOM diarahkan agar seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data prioritas dapat berjalan secara terstandarisasi, terbuka, dan akuntabel, serta memudahkan pemutakhiran maupun interoperabilitas data di tingkat pusat dan daerah. Proses ini melibatkan konfirmasi dan koordinasi antar unit, penggabungan data dari beberapa sistem, serta penguatan klasifikasi dan keamanan data sesuai dengan kebutuhan monitoring dan pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi SPLP dalam pengelolaan data prioritas BPOM dapat semakin optimal, sehingga mendukung terwujudnya satu data Indonesia yang handal dan mampu memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan di lingkungan BPOM secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, layanan data terbuka berkaitan dengan pembuatan dan pemutakhiran Dashboard BCC dan Webgis antara lain : **Dashboard Capaian Output PPSPDM, Webgis Wilayah Kerja UPT WBK/WBBM, Dashboard Rekomendasi Kebijakan Standar Pangan Olahan, Dashboard Monitoring Tiket Help Pusdatin, dan Dashboard Pemanfaatan BPOM Command Center**. Hal tersebut menjadi faktor pendukung kinerja layanan data terbuka dan kedepannya dapat menjadi poin pengembangan pengelolaan data terbuka di lingkungan BPOM.

p. Indeks Pembangunan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik pada saat ini disesuaikan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 yang menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana *Grand Design* RB 2025 – 2045 dan Roadmap RB 2025 – 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**. Pusdatin telah menyampaikan Usulan Perubahan Target IKU Pusdatin Indeks Pembangunan Statistik (IPS) TA 2025 – 2029 ke Biro Perencanaan dan Keuangan.

q. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN)

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan bagian integral dari upaya penguatan tata kelola teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kesiapan instansi pemerintah, termasuk Badan POM, dalam memanfaatkan infrastruktur PDN sebagai tulang punggung penyimpanan dan pengelolaan data pemerintah yang andal, aman, dan terpusat. Monev PDN menjadi instrumen penting dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan migrasi sistem dan layanan ke PDN dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Implementasi kegiatan Monev PDN dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi tata kelola SPBE yang mendukung indikator Indeks SPBE di Triwulan II adalah **Pengisian Laporan Berkala Penggunaan Kapasitas Layanan Government Cloud atau Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).**

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor: B-371/DJTPD/AI.01.01/06/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Laporan Berkala Penggunaan Kapasitas, disampaikan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pusat Data Nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya terkait pemanfaatan layanan *Government Cloud* atau Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh 394 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD), Kementerian Komunikasi dan Digital melaksanakan kegiatan pemantauan dan optimalisasi atas kapasitas sumber daya yang digunakan oleh setiap tenant.

Sebagai bagian dari proses pemantauan dimaksud, setiap tenant diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai sumber daya yang telah dialokasikan, tingkat pemanfaatan, serta jenis layanan yang dihasilkan dari penggunaan kapasitas tersebut. Laporan disampaikan secara resmi kepada Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Adapun pelaporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dengan menyampaikan data dan informasi terkait pemanfaatan sumber daya PDNS oleh unit-unit kerja yang relevan. Pelaksanaan pelaporan ini merupakan wujud komitmen Badan POM dalam mendukung tata kelola pemanfaatan PDNS yang efisien, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan nasional SPBE.

r. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) merupakan bagian krusial dalam upaya penguatan konektivitas dan integrasi sistem informasi antar instansi pemerintah, sebagai landasan percepatan transformasi digital nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penggunaan JIP oleh instansi

pemerintah, termasuk Badan POM, dalam mendukung pertukaran data dan layanan elektronik secara aman, cepat, dan terstandar. JIP sebagai jaringan tertutup pemerintah menjadi pondasi utama dalam menjamin keamanan lalu lintas data, menurunkan ketergantungan pada jaringan publik, serta meningkatkan keandalan komunikasi antar layanan digital lintas sektor. Monev JIP berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang mengukur kepatuhan terhadap ketentuan teknis, kesesuaian arsitektur jaringan, dan kesiapan infrastruktur dalam mengadopsi konektivitas JIP secara penuh. Implementasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan JIP yang mendukung pencapaian indikator Indeks SPBE di Triwulan kedua diantaranya:

1) Rapat Konfirmasi Pemanfaatan JIP dan SPLP pada Ekosistem PDN dengan Kementerian Komunikasi Dan Digital RI

Sehubungan dengan upaya percepatan integrasi layanan digital pemerintah melalui pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam ekosistem Pusat Data Nasional (PDN), telah dilaksanakan rapat konfirmasi antara Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPOM dan Direktorat Komunikasi Digital (Komdigi) Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Rapat dimulai pada tanggal 14 Mei 2025. Rapat ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi teknis dan menyelaraskan pemahaman antara BPOM dan Komdigi terkait pemanfaatan JIP dan SPLP sebagai bagian dari infrastruktur layanan SPBE nasional. Adapun pokok bahasan dalam rapat meliputi: (1) Pemanfaatan JIP; (2) Instalasi JIP; (3) Integrasi SPLP; (4) Koordinasi dan Komunikasi Teknis; serta (5) Kolaborasi Pusdatin dan Komdigi. Selain memberikan tanggapan atas isu-isu yang disampaikan, tim Komdigi juga menyampaikan arahan strategis dan rekomendasi teknis sebagai bagian dari langkah bersama dalam mewujudkan interoperabilitas layanan pemerintah yang aman, efisien, dan berstandar nasional.

2) Laporan Layanan Badan POM kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI terkait pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara dan Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan merujuk pada surat sebelumnya, disampaikan bahwa seluruh layanan elektronik Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), termasuk layanan backup dan Disaster Recovery Center (DRC), telah sepenuhnya (100%) memanfaatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDiGi). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan POM telah menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai bentuk apresiasi atas dukungan yang telah diberikan, sekaligus melaporkan pemanfaatan fasilitas PDNS dan JIP yang telah digunakan secara optimal oleh Badan POM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- s. Hasil Monitoring Sensor Keamanan pada Infrastruktur BPOM oleh Direktorat Analisa Forensik BIN
Tim Keamanan TIK dan Persandian secara akuntabel menindaklanjuti hasil monitoring sensor keamanan yang dilakukan oleh Direktorat Analisa Forensik BIN dengan melakukan analisis insiden dan pelaporan tindak lanjut secara berkala untuk memastikan keamanan infrastruktur digital BPOM tetap terjaga. Rekomendasi mitigasi: pergantian password secara berkala dan implementasi multi-factor authentication. Himbauan ke pengguna untuk melakukan reset password menggunakan password yang kuat. Pemblokiran permanen terhadap alamat IP Sumber ancaman serangan. Mengisolasi sistem terdampak dari jaringan untuk mencegah penyebaran malware lebih lanjut. Memastikan semua perangkat lunak dan sistem di server diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Sert rencana untuk mengidentifikasi endpoint yang terinfeksi dan mengkomunikasikan risikonya kepada pemilik.
- t. Koordinasi Tim CSIRT Tahun 2025
Dalam kerangka akuntabilitas, Tim Keamanan TIK dan Persandian melaksanakan koordinasi intensif dengan Tim CSIRT sepanjang tahun 2025 guna memastikan respons cepat terhadap insiden siber dan peningkatan kapabilitas keamanan informasi secara terintegrasi. Tim CSIRT BPOM agar bersama-sama mengidentifikasi celah keamanan pada aplikasi sistem informasi kita. Sejak Januari sampai dengan Maret 2025, Pusdatin mencatat ada 5 (lima) insiden serangan siber yang cukup signifikan. Kerentanan keamanan tidak ditembus pada sisi yang paling kuat, tapi di sisi yang paling lemah. Oleh karena itu Informasi seperti ini agar juga sampai ke pimpinan untuk *aware* terhadap keamanan informasi kita semua. Penyampaian pada kegiatan ini terkait isu *secure coding*. Pembahasan mengenai *secure coding* ini dengan menggunakan tools Snyk. Dalam pertemuan Koordinasi Tim CSIRT ini juga disampaikan kembali tugas Tim CSIRT (TTIS) BPOM, antara lain seperti: Pemberian peringatan adanya serangan siber, Penanggulangan dan pemulihan insiden siber, Penanganan kerentanan celah keamanan siber dan layanan manajemen kualitas keamanan (analisis risiko serta edukasi dan pelatihan). Ancaman umum serangan siber yang biasa terjadi seperti: SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Scripting (XSS), Insecure Deserialization dan Cross-Site Request Forgery (CSRF).
- u. Koordinasi Penanganan Domain Ilegal terkait pom.go.id dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Pengelola Nama Domain Internet Indonesia
Sebagai wujud akuntabilitas, Tim Keamanan TIK dan Persandian secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta PANDI dalam upaya penanganan domain ilegal yang mengatasnamakan pom.go.id, untuk melindungi reputasi lembaga dan mencegah penyalahgunaan identitas digital. Ada lebih dari puluhan subsite atau website yang kemudian menyerupai bahkan mirip dengan konten yang ditayangkan dalam domain resminya Badan POM. Subsite-subsite yang meniru isi konten di websitenya

Badan POM ini kami anggap bisa memecahkan masyarakat. Pusdatin mendapatkan laporan dari internal dan eksternal terkait adanya sejumlah domain yang meniru struktur dan tampilan dari domain resmi web dan subsite Badan POM berupa domain .id dan .org. Temuan tersebut berpotensi membingungkan masyarakat dan dapat merusak kredibilitas BPOM sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan obat dan makanan.

v. Monitoring Operasi Keamanan Siber

Tim Keamanan TIK dan Persandian menunjukkan akuntabilitas melalui pelaksanaan monitoring operasi keamanan siber secara berkelanjutan guna mendeteksi potensi ancaman dan menginisiasi langkah mitigasi secara tepat waktu demi menjaga keberlangsungan layanan digital BPOM. Dalam upaya menjaga keamanan siber nasional, khususnya pada sektor pemerintahan, pemantauan terhadap anomali trafik dan kerentanan sistem informasi menjadi hal yang sangat krusial. Selama periode 1 Januari hingga 15 Juni 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan pemantauan dan analisis terhadap trafik jaringan secara nasional, termasuk terhadap aset milik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara nasional terdapat banyak anomali trafik, yang sebagian besar didominasi oleh serangan jenis malware. BPOM menjadi salah satu institusi yang terindikasi terdampak oleh berbagai jenis ancaman siber. Hasil analisis kerentanan pada BPOM ditemukan sebanyak 121 hit kerentanan dengan 121 jenis kerentanan. kerentanan pada PHP yang merupakan dalam *use-after-free vulnerability* dengan level CRITICAL, alamat IP dengan jumlah hit terbanyak yaitu 103.8.238.102 yang merupakan IP server BPOM dengan jumlah hit 119. berdasarkan 121 jenis kerentanan ditemukan bahwa 38% termasuk kategori critical, 50% termasuk high, 9% medium, 3% termasuk N/A. Rekomendasi setelah penyampaian monitoring keamanan siber ini yaitu:

- 1) Melakukan validasi terhadap temuan kebocoran data kredensial milik pegawai atau pengguna
- 2) Tidak menggunakan software bajakan, rutin update software, dan menggunakan antivirus pada perangkat
- 3) Mewajibkan update password secara berkala
- 4) Memberlakukan MFA(multi-factor authentication) bagi para pengguna
- 5) Tidak menggunakan email dinas di luar kepentingan kedinasan
- 6) Memberikan security awareness kepada SDM atau pegawai agar waspada terhadap adanya upaya akses tidak sah
- 7) Melakukan koordinasi dan reaksi cepat tanggap kepada tim bssn untuk meminimalkan dampak insiden siber

w. Pelaksanaan Penyampaian Hasil Vulnerability Assessment

Dalam menjamin transparansi dan tanggung jawab, Tim Keamanan TIK dan Persandian menyampaikan hasil vulnerability assessment kepada pihak terkait secara sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan sistem keamanan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Salah satu identifikasi

kerentanan juga dilakukan melalui kegiatan Vulnerability Assessment menggunakan tools Burp Suite Professional. Terhadap hasil Vulnerability Assessment (VA), Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menyampaikan risiko tersebut kepada pemilik aplikasi melalui pertemuan dengan perwakilan unit kerja. Ini sehubungan dengan tugas Tim Keamanan TIK dan Persandian untuk mendeteksi risiko pada sistem informasi dalam mendukung operasional Pusdatin BPOM.

x. Pemenuhan layanan publik BPOM terintegrasi dengan sistem nasional

1) Integrasi *Indonesia Single Risk Management (ISRM)* dengan Exim (export import)

Dalam rangka upaya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Tim Nasional Stranas PK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tema Penguatan Tata Kelola Impor sebagai salah satu aksi di tahun 2025- 2026. Telah dilaksanakannya pembahasan Pemanfaatan Manajemen Risiko Pelaku Usaha tanggal 5 Juni 2025 diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dihadiri oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Adapun perwakilan dari Badan POM, yaitu Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Inspektorat, dan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

Terdapat beberapa poin-poin hasil dari pembahasan tersebut, sebagai berikut:

- a) Terdapat 2 opsi terkait mekanisme integrasi data yaitu K/L menambahkan parameter - sub parameter di *Indonesia Single Risk Management (ISRM)* atau K/L memberikan input/update untuk parameter umum, serta memiliki pertimbangan tambahan di parameter khusus.
- b) Untuk elemen data pada parameter khusus merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga dan untuk elemen data pada parameter umum dapat digunakan oleh semua Kementerian/Lembaga. Pada elemen data gudang direncanakan akan masuk di parameter khusus, dikarenakan terdapat perbedaan risiko setiap Kementerian/Lembaga.
- c) Terkait skoring, untuk parameter khusus akan masuk pada skoring setiap Kementerian/Lembaga, sedangkan untuk parameter umum tidak masuk pada skoring dan jika parameter umum tidak dapat terpenuhi, maka tidak dapat masuk ke parameter khusus.

Pada tahun 2025 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan hanya memiliki anggaran untuk re-engineering/re-design aplikasi ekspor dan impor dari **e-bpom.pom.go.id** ke dalam aplikasi **exim.pom.go.id**, sehingga pengembangan Manajemen Risiko Pelaku Usaha (ISRM) akan direncanakan pada tahun 2026.

2) Integrasi SMARTPOM ke SIKD-NG

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk peningkatan pengawasan Obat dan Makanan, Pusdatin berperan dalam mendukung integrasi dan interoperabilitas data, penguatan infrastruktur TIK, serta peningkatan layanan digital guna mempercepat transformasi digital nasional. Kolaborasi ini dilakukan melalui pertukaran data, integrasi sistem, serta pengembangan bersama inovasi layanan berbasis elektronik.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) secara proaktif meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui penguatan sinergi dan kolaborasi digital dengan berbagai lembaga strategis.

Pada triwulan II Tahun 2025, PUSDATIN telah melakukan integrasi SMARTPOM ke SIKD NG (Sistem Informasi Keuangan Daerah Next Generation), Sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital dan penguatan tata kelola data keuangan yang transparan dan terintegrasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menginisiasi dan merealisasikan integrasi sistem antara aplikasi SMARTPOM dan SIKD NG milik Kementerian Keuangan.

Melalui integrasi ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) di seluruh daerah dapat menginput pagu anggaran langsung ke dalam SIKD NG Kemenkeu, yang kemudian secara otomatis terintegrasi ke dalam aplikasi SMARTPOM. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi data perencanaan anggaran dengan sistem pengawasan yang digunakan Dinas Kesehatan, sehingga mendukung proses perencanaan dan pelaporan yang lebih efisien serta akurat.

Selanjutnya, setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Dinkes dan realisasi anggaran dicatat di dalam aplikasi SMARTPOM, data tersebut akan dikembalikan dan disinkronisasi ke dalam sistem SIKD NG Kemenkeu melalui mekanisme Satu Data POM. Proses ini memastikan bahwa seluruh aktivitas dan penggunaan anggaran dapat terpantau secara real-time oleh stakeholder terkait, termasuk Kementerian Keuangan, serta mendukung prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.

Langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen Badan POM dalam membangun sistem informasi yang interoperabel dan efisien, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mendukung ekosistem Satu Data Indonesia, khususnya dalam hal pengawasan dan pembinaan penggunaan anggaran di sektor kesehatan.

3) Monitoring dan Evaluasi TTE

Dalam rangka percepatan perizinan dan birokrasi baik untuk eksternal maupun internal, Badan POM sudah bekerjasama dengan Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Dengan Kerjasama ini Badan POM dapat

menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang difasilitasi oleh BSRE. TTE sudah diterapkan secara bertahap terhadap sistem elektronik di Badan POM untuk mendukung layanan di Badan POM berjalan secara optimal sesuai dengan perkembangan digitalisasi.

Layanan Tanda Tangan Elektronik sudah digunakan sebagai alat autentikasi dokumen digital. Untuk kebutuhan internal TTE sudah digunakan pada dokumen terkait kepegawaian pengajuan pada aplikasi SIASN seperti Penilaian SKP, Berita Acara Hasil Pembinaan, Dokumen PAK Konversi dan AK, dan SK Kepegawaian. Sedangkan penerapan TTE pada layanan publik dilakukan pada dokumen perizinan dan surat untuk pengujian pihak ketiga.

Pada triwulan II tahun 2025, pegawai Badan POM yang sudah terdaftar memiliki TTE sebanyak 5.361. Jumlah aplikasi yang sudah terintegrasi dengan layanan TTE sebanyak 16 aplikasi dengan total transaksi sebanyak 50.473 dokumen yang di TTE. Aplikasi yang paling banyak melakukan transaksi TTE pada triwulan ini adalah aplikasi e-BPOM yang digunakan untuk menandatangani perizinan import dan ekspor. Selain itu penggunaan TTE untuk internal Badan POM juga banyak dilakukan pada aplikasi SIASN.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan TTE pada Triwulan II tahun 2025 antara lain: gagalnya proses unduh PDF dari aplikasi e-Standar Pangan, serta beberapa pengguna yang ternonaktifkan akibat perbedaan NIK antara data SIASN dan data dari BsrE. Untuk mengatasi hal tersebut, sudah dilakukan penyesuaian penggunaan pada API TTE Gateway serta penyampaian kepada pegawai terkait untuk menyesuaikan NIK pada aplikasi SIASN.

4) Monitoring dan Evaluasi OSS

Sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan POM terus memperkuat keterlibatannya dalam sistem Online Single Submission – Risk-Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini menjadi terobosan penting dalam transformasi perizinan berusaha nasional, dengan menekankan efisiensi, transparansi, serta perlindungan terhadap masyarakat. Dukungan Badan POM terhadap integrasi OSS-RBA dilakukan melalui pengembangan sistem, harmonisasi layanan, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan efektivitas pelaksanaan di sektor pengawasan obat dan makanan.

Pada triwulan II tahun 2025, Badan POM melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan integrasi OSS-RBA, baik dari aspek teknis maupun prosedural. Kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi antar unit kerja dan instansi terkait untuk mengidentifikasi kendala, merumuskan solusi, serta mempercepat integrasi layanan.

Perkembangan integrasi OSS-RBA yang mencakup sejumlah aplikasi pendukung seperti New Aero, Asrot, Notifkos, serta aplikasi lainnya yang terhubung dengan proses perizinan. Hingga saat ini, tercatat 76 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PB-UMKU) yang terdaftar, terdiri atas 67 PB-UMKU yang telah terintegrasi dan 9 PB-UMKU yang masih memerlukan penyesuaian hak akses. Sementara itu, 42 layanan telah berjalan secara live, dan 1 layanan dalam tahap uji coba.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dengan adanya SPBE, layanan Badan POM menjadi lebih **terukur, cepat, aman, dan terjangkau**, sekaligus memperkuat upaya dalam pengawasan obat dan makanan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja SPBE adalah sebagai berikut:

a. Implementasi SPBE di Lingkungan Badan POM

Program penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Badan POM. Pelaksanaan berbagai rapat koordinasi, diskusi teknis, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan menjadi kunci dalam mempercepat adaptasi unit-unit kerja terhadap kebijakan SPBE. Selain itu, penyusunan dan pengembangan modul pembelajaran SPBE yang meliputi berbagai aspek seperti infrastruktur, keamanan, pengelolaan data, dan proses bisnis menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman yang merata di seluruh lini organisasi.

b. Sosialisasi Standar Sistem Informasi dan Standar Infrastruktur TIK

Sosialisasi terkait Standar Sistem Informasi dan Standar Infrastruktur TIK dilakukan secara masif untuk menjamin seluruh unit kerja memahami ketentuan teknis yang berlaku. Program ini dilaksanakan dengan menjangkau lebih dari 180 peserta dari unit kerja pusat dan UPT di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, setiap unit diberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip interoperabilitas, keamanan informasi, hingga efisiensi dalam pembangunan aplikasi dan pengadaan perangkat infrastruktur TIK. Kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan unit teknis untuk mendalami kendala-kendala di lapangan.

c. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengetahuan SPBE

Penyusunan kebijakan Manajemen Pengetahuan SPBE merupakan langkah strategis dalam penguatan tata kelola pengetahuan di lingkungan Badan POM. Kegiatan ini melibatkan koordinasi lintas unit, mulai dari PPSDM, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Umum, hingga Biro Perencanaan dan Keuangan. Proses review, pembahasan, dan permintaan persetujuan secara formal menjadi bagian dari penyusunan kebijakan yang berorientasi pada penerapan praktis dan terukur. Hasil dari program ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengelolaan pengetahuan digital secara sistematis di seluruh unit kerja.

d. **Assessment Mandiri Indeks SPBE**

Sebagai bagian dari program monitoring dan evaluasi implementasi SPBE, assessment mandiri dilakukan untuk mengukur kesiapan organisasi dalam penyelenggaraan layanan digital. Melalui kegiatan ini, Badan POM dapat secara berkala mengidentifikasi sejauh mana kemajuan implementasi SPBE sekaligus mendeteksi hambatan yang memerlukan perbaikan. Hasil dari assessment ini menjadi dasar perbaikan kebijakan maupun teknis untuk mendorong pencapaian indeks SPBE yang lebih baik.

e. **Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE**

Program penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE berfungsi sebagai kerangka utama dalam integrasi sistem digital di Badan POM. Dokumen ini dirancang untuk menjadi acuan pembangunan dan pengembangan aplikasi di seluruh unit kerja, memastikan bahwa seluruh sistem berjalan secara terintegrasi, efisien, dan sesuai arah strategis organisasi. Proses legalisasi melalui koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi menjadi tahap penting dalam memberikan legitimasi formal pada kebijakan ini.

f. **Reviu SOP Makro dan Mikro Terkait Layanan SPBE**

Penyusunan dan reviu SOP Makro dan Mikro dilakukan sebagai bagian dari standarisasi proses operasional layanan TIK. Penyelesaian seluruh SOP Mikro dan dokumentasi matriks perubahan SOP menjadi wujud penguatan pengendalian internal. Selain itu, penyusunan Draft SOP Makro yang telah dikirimkan untuk proses harmonisasi dengan Biro Hukum dan Organisasi menunjukkan komitmen Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam menjaga keselarasan prosedur layanan dengan peraturan perundang-undangan.

g. **Pendaftaran Sistem Elektronik di PSE Komdigi**

Sebagai pemenuhan amanat regulasi nasional terkait SPBE, Badan POM telah menjalankan program pendaftaran seluruh sistem elektronik yang dikelola ke dalam portal PSE Komdigi. Program ini bertujuan memastikan bahwa seluruh layanan digital Badan POM memiliki legalitas yang sah dan terdaftar secara resmi, sekaligus mematuhi persyaratan Clearance EGA SPBE. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dengan koordinasi yang baik antar unit kerja.

h. **Pemenuhan Standarisasi Sistem Informasi**

Dalam rangka memastikan pengembangan aplikasi yang tepat sasaran dan efisien, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengelola pengajuan 36 aplikasi baru berdasarkan Peta Rencana SPBE. Program ini dilakukan dengan melibatkan unit pemilik aplikasi dalam proses analisis dan kajian, sehingga seluruh aplikasi yang dikembangkan benar-benar sesuai kebutuhan strategis Badan POM. Program ini juga mencegah terjadinya duplikasi layanan dan memastikan aplikasi yang dikembangkan memiliki manfaat operasional.

- i. Pemenuhan Rekomendasi Permohonan Alat Pengolah Data (APD)
Program pengendalian pengadaan perangkat kerja di seluruh unit Badan POM dilaksanakan melalui proses reviu teknis dan penerbitan rekomendasi pengadaan APD. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memastikan bahwa seluruh perangkat yang diusulkan memenuhi standar teknis dan kebijakan pengelolaan aset TIK. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran operasional layanan digital dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
- j. Penyusunan Standar Layanan TIK dan SLA
Penyusunan Service Level Agreement (SLA) untuk 21 layanan TIK menjadi program penting dalam memperkuat tata kelola layanan di Badan POM. Program ini mencakup pengaturan parameter layanan seperti RTO dan RPO, serta penyusunan standar waktu penyelesaian layanan. Selain itu, dilakukan integrasi tools monitoring layanan ke dalam aplikasi internal, serta pembaruan istilah layanan helpdesk menjadi lebih modern dan terpusat, menyesuaikan perkembangan sistem layanan digital.
- k. Audit Internal ISO 27001:2022
Pelaksanaan audit internal ISO 27001:2022 merupakan bagian dari komitmen Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam menjaga sistem manajemen keamanan informasi. Audit ini dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh proses pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan POM. Kegiatan awareness ISO juga mendukung peningkatan pemahaman seluruh pegawai terhadap standar keamanan informasi yang berlaku secara internasional.
- l. Implementasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016
Sebagai bentuk penerapan budaya integritas di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, program implementasi ISO 37001:2016 dijalankan melalui awareness, evaluasi internal, dan audit sistem anti-penyuapan. Program ini bertujuan mencegah praktik suap dan korupsi, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses bisnis di Badan POM berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- m. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan II antara lain:
 - 1) **Assesment Pemanfaatan BigBox dengan Peruri**
Rapat teknis lanjutan antara BPOM dan Peruri mengenai pemanfaatan BigBox menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data besar, khususnya terkait integrasi, keamanan, dan efisiensi proses penarikan serta penyimpanan data dari berbagai aplikasi sumber. Dalam konteks penguatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), pembahasan menekankan pentingnya membangun arsitektur data yang mampu mengatasi kendala koneksi antar server secara aman (menggunakan SSH), optimalisasi flow ETL di Apache NiFi, serta

penyederhanaan alur pengambilan data berkapasitas besar dengan pendekatan *Change Data Capture* (CDC).

- 2) **Rapat Konsolidasi Data RHPK**, yang bertujuan untuk sinkronisasi dan konfirmasi data antara Pusdatin selaku wakil data bersama dengan produsen data.
- 3) **Rapat pembahasan konsolidasi data ekspor dan impor obat serta makanan** yang dilaksanakan pada 4 Juni 2025 membahas pentingnya validasi, konsistensi, dan integrasi data antar unit di lingkungan BPOM.
- 4) **Rapat Diskusi Teknis Implementasi Layanan Otomasi Analisis Data bersama CBN** menandai langkah strategis Pusdatin BPOM dalam memperkuat tata kelola data dan integrasi layanan digital berbasis kecerdasan buatan.
- 5) **Permintaan dan Pemanfaatan Data oleh Internal dan Eksternal BPOM**
Sepanjang TW 2 tahun 2025, sejumlah unit kerja di BPOM dan mitra eksternal telah mengakses data melalui Portal Satu Data. Beberapa data yang dibagipakaian baik secara API ataupun berupa dataset antara lain:
 - Data DJP - KSWP
 - Aplikasi SIMETRIS Realisasi Anggaran TA 2025
 - Aplikasi e-sertifikasi tentang master sarana
 - ALADIN → pelaporan DAK Non Fisik
 - Aplikasi KBCC
 - Master Data - Kabupaten / Kota dan provinsi
 - Aplikasi BPOM Mobile - JDIH - Peraturan
 - Master Data - Unit Kerja Badan POM
 - Aplikasi WebReg - Negara Asal Perusahaan
 - Aplikasi DJP (PMK, Industri farmasi, Laporan produksi obat, Laporan distribusi obat, Laporan Produksi dan Distribusi Bahan Baku Obat, Daftar Harga Eceran Tertinggi Obat (HET))
 - Aplikasi RHPK - SIPT Pengujian
 - Data Jumlah Permohonan Registrasi pada Aplikasi Notifikasi Kosmetik (harian)
 - Data Jumlah Permohonan Registrasi pada Aplikasi ASROT (harian)
 - Data Jumlah Permohonan Registrasi pada Aplikasi Notifikasi Kosmetik (bulanan)
 - Data Jumlah Permohonan Registrasi pada Aplikasi ASROT (bulanan)
 Seluruh permintaan difasilitasi melalui i dan dilakukan validasi permintaan sesuai SOP permintaan data publik dan internal.

n. Layanan Data terbuka

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan II antara lain:

1) **Pembukaan Serial Workshop Gotong Royong Data (WGRD) Tahun 2025**

Serial Workshop Gotong Royong Data (WGRD) Tahun 2025 merupakan rangkaian pertemuan kolaboratif antara para pemangku kepentingan Satu

Data Indonesia (SDI) dengan Kementerian dan Lembaga, yang bertujuan untuk menyusun dan menyepakati Data Prioritas.

2) Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Akun Badan POM Command Center (BCC) Unit Pusat Semester 1 (16 Juni 2025)

Rapat monitoring dan evaluasi (monev) terkait pemanfaatan akun BCC dilakukan untuk meninjau sejauh mana masing-masing unit memanfaatkan akun BCC setelah dilakukan redesain dan pengembangan sistem.

3) Sosialisasi dan Pelatihan Perencanaan Data/Data Prioritas

Sebelumnya proses perencanaan Data Prioritas masih dilakukan secara semi-manual melalui email. Namun, mulai tahun 2025, Bappenas menyediakan aplikasi perencanaan sebagai sarana dalam penyusunan Data Prioritas. Untuk mendukung implementasi aplikasi ini, Bappenas menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi tersebut, yang berfungsi untuk melakukan reviu, penajaman, dan konfirmasi atas daftar indikatif, serta menampung usulan Data Prioritas, baik dari internal maupun eksternal.

4) Rapat Pembahasan Usulan Data Prioritas BPOM (10 Juni 2025)

Rapat pembahasan usulan data prioritas BPOM tahun 2025 yang dilaksanakan pada 10 Juni 2025 merupakan tindak lanjut dari pembukaan serial WGRD, dalam rapat ini dibahas penetapan dan penyusunan data prioritas yang menjadi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik sesuai arahan RPJMN 2025–2029.

5) Kunjungan ke BPOM Command Center (BCC)

- a) Kunjungan dari Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret (15 April 2025)
- b) Kegiatan Wawancara dengan B-TV (14 Mei 2025)
- c) Kunjungan CPNS BPOM 2025 (28 Mei 2025)
- d) Kunjungan CPNS BPOM Pusdatin (10 Juni 2025)
- e) Kegiatan Wawancara iNews dengan Ka. Badan (26 Juni 2025)

6) Pembuatan dan Pemutakhiran Dashboard BCC dan Webgis

- a) Pemutakhiran Dashboard Capaian Output PPSDM
- b) Pembuatan Layer Webgis Wilayah Kerja UPT WBK/WBBM-Inspektorat
- c) Pemutakhiran Data Layer Webgis-Profil UPT Data Kerjasama UPT-Biro KSHM
- d) Pembuatan Dashboard Rekomendasi Kebijakan Standar Pangan Olahan
- e) Pembuatan Dashboard Monitoring Tiket Help Pusdatin
- f) Pembuatan Dashboard Pemanfaatan BPOM Command Center

o. Manajemen data

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan II antara lain :

- 1) Rapat Pembahasan Pedoman Manajemen Data (20 Mei 2025)
Rapat ini bertujuan untuk membahas sekaligus melakukan reviu terhadap pedoman manajemen data di lingkungan BPOM berdasarkan hasil Evaluasi Satu Data Indonesia tahun 2023.
 - 2) Reviu Penyusunan SOP sebagai Rekomendasi dari Evaluasi Satu Data
Pada TW II, kegiatan manajemen data juga melaksanakan reviu keterkaitan antara SOP yang dihasilkan dari rekomendasi hasil Evaluasi Satu Data Indonesia dengan SOP Makro, SOP Mikro dan Pedoman Manajemen Data di Lingkungan BPOM. Rekomendasi SOP terdiri dari:
 - SOP Perencanaan Data
 - SOP Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk
 - SOP Pengumpulan Data
 - SOP Pemeriksaan Data
 - SOP Pengusulan Data Prioritas/Daftar Data.
 - SOP Manajemen Akses
 - SOP Penyebarluasan Data
 - SOP Penyelenggaraan Forum SDI
- p. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN)
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional di Triwulan 2:
- 1) Rapat Paparan hasil Proof Of Concept (POC) Privileged access management (PAM) Badan POM tanggal 22 April 2025
Paparan dilakukan untuk mengevaluasi hasil uji coba implementasi mekanisme PAM dalam rangka meningkatkan keamanan akses sistem informasi pada infrastruktur TIK di lingkungan Badan POM.
 - 2) Rapat Koordinasi POC Dynatrace Asia-Pacific Pte Ltd tanggal 19 Mei 2025
Kegiatan ini membahas hasil PoC terkait pemantauan sistem dan observabilitas yang ditawarkan Dynatrace, serta potensi integrasinya dalam infrastruktur Pusat Data Badan POM.
 - 3) Rapat Manajemen Risiko Infrastruktur TIK tanggal 29 April 2025
Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan langkah mitigasi risiko terhadap infrastruktur TIK guna memastikan ketersediaan dan keandalan layanan sistem elektronik Badan POM.
 - 4) Rapat Reviu dan Evaluasi SOP Mikro Fungsi Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data Tahun 2025 tanggal 15 Mei 2025
Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian prosedur operasional standar dalam pengelolaan mikro fungsi pada infrastruktur dan fasilitas pusat data.
 - 5) Monev Pemenuhan Standar Infrastruktur tanggal 10 Juni 2025
Kegiatan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pemenuhan standar infrastruktur TIK telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung efisiensi layanan elektronik Badan POM.

- 6) Rapat Update Teknologi dari PT. DCI Indonesia tanggal 18 Juni 2025
Paparan dari pihak PT DCI Indonesia mengenai perkembangan teknologi pusat data terbaru yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan layanan dan infrastruktur PDN.
- 7) Ticketing PDNS:
 - a) Permohonan backup VPS Badan POM 2025
 - b) Permohonan Laporan Backup PDN
 - c) Permohonan vGPU untuk server Notifikos BPOM
- q. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) di Triwulan 2:
 - 1) Rapat Konfirmasi terkait Pemanfaatan JIP dan SPLP pada Ekosistem PDN tanggal 14 Mei 2025
Rapat ini membahas kesiapan dan pemanfaatan JIP dan SPLP sebagai bagian dari integrasi layanan elektronik nasional di lingkungan Badan POM.
 - 2) Permintaan Permohonan Penambahan Bandwidth JIP
 - 3) Pembuatan VPN PIC Aplikasi yang berguna untuk mengamankan dan mengenkripsi koneksi antara server dan pihak terkait, guna menjaga kerahasiaan data, mencegah penyadapan, dan memastikan integritas komunikasi dalam pengelolaan sistem atau layanan digital.
- r. Rapat Koordinasi Tim CSIRT Tahun 2025
Koordinasi Tim CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) BPOM Tahun 2025. Dalam pertemuan Koordinasi Tim CSIRT ini disampaikan kembali tugas Tim CSIRT (TTIS) BPOM, antara lain seperti: Pemberian peringatan adanya serangan siber, Penanggulangan dan pemulihan insiden siber, Penanganan kerentanan celah keamanan siber dan layanan manajemen kualitas keamanan (analisis risiko serta edukasi dan pelatihan). Ancaman umum serangan siber yang biasa terjadi seperti: SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Scripting (XSS), Insecure Deserialization dan Cross-Site Request Forgery (CSRF). dihadiri oleh perwakilan Unit Kerja Pusat, Balai Besar/ Balai POM, dan Loka POM seluruh Indonesia. Acara ini diselenggarakan di Gedung Batik Lantai 6, BPOM dan melalui aplikasi zoom meeting pada tanggal 14 Mei 2025.
- s. Pembahasan Hasil Monitoring Sensor Keamanan pada Infrastruktur BPOM oleh Direktorat Analisa Forensik BIN
Kegiatan lain yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II 2025 antara lain :
Pembahasan Hasil Monitoring Sensor Keamanan pada Infrastruktur Badan POM antara lain:
 - 1) Rekomendasi mitigasi: pergantian password secara berkala dan implementasi multi-factor authentication.

- 2) Himbauan ke pengguna untuk melakukan reset password menggunakan password yang kuat.
 - 3) Sepakat untuk melakukan reset password pada aplikasi e-share dengan pendekatan tertentu.
 - 4) Pemblokiran permanen terhadap alamat IP Sumber ancaman serangan.
 - 5) Pengecekan menyeluruh terhadap alamat IP endpoint milik Badan POM yang diduga melakukan komunikasi dengan server C&C malware yang mencoba akses ke situs yang terindikasi merupakan host malware.
 - 6) Mengisolasi sistem terdampak dari jaringan untuk mencegah penyebaran malware lebih lanjut.
 - 7) Memastikan semua perangkat lunak dan sistem di server diperbarui dengan patch keamanan terbaru.
 - 8) Tim SI akan koordinasi dengan pemilik aplikasi dan membuat nota dinas untuk penanganan sistem.
 - 9) Sepakat untuk memaksakan penggantian password di beberapa aplikasi.
 - 10) Rencana untuk mengidentifikasi endpoint yang terinfeksi dan mengkomunikasikan risikonya kepada pemilik.
- t. Koordinasi Penanganan Domain Ilegal terkait pom.go.id dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia
- Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II 2025 ini antara lain :
- 1) Rapat Koordinasi Penanganan Domain Ilegal terkait pom.go.id dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 melalui aplikasi zoom meeting. Ada lebih dari puluhan subsite atau website yang kemudian menyerupai bahkan mirip dengan konten yang ditayangkan dalam domain resminya Badan POM. Subsite-subsite yang meniru isi konten di websitenya.
 - 2) Pusdatin sudah melakukan koordinasi dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dengan melaporkan beberapa domain ilegal .id melalui email ke helpdesk@pandi.id dan mayoritas domain tersebut sudah dilakukan take down. Untuk domain .org juga sudah dilakukan pengaduan melalui aduankonten.id (email tanggal 6 Maret 2025) namun belum ada email respon lebih lanjut.
- u. Monitoring Operasi Keamanan Siber
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II 2025 antara lain :
- 1) Rapat Pertemuan Kegiatan Monitoring Operasi Keamanan Siber, di Ruang Rapat Besar Lantai 2 Gedung Rempah. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Tim Keamanan TIK dan Persandian, Sigit Ariwibowo, Sandiman Ahli Muda Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan semua fungsi tim Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
 - 2) Dalam rangka menjaga keamanan siber nasional, khususnya pada sektor pemerintahan, pemantauan terhadap anomali trafik dan kerentanan

sistem informasi menjadi hal yang sangat krusial. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara nasional terdapat banyak anomali trafik, yang sebagian besar didominasi oleh serangan jenis malware. BPOM menjadi salah satu institusi yang terindikasi terdampak oleh berbagai jenis ancaman siber.

v. Pelaksanaan Penyampaian Hasil Vulnerability Assessment (VA)

Kegiatan lain yang juga menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II 2025 antara lain:

- 1) Tugas Tim Keamanan TIK dan Persandian mendeteksi risiko pada sistem informasi dalam mendukung operasional Pusdatin BPOM. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah pengerjaan System Integration Testing (SIT) dan Vulnerability Assessment selama periode Triwulan II tahun 2025.
- 2) Salah satu identifikasi kerentanan juga dilakukan melalui kegiatan Vulnerability Assessment menggunakan tools Burp Suite Professional. Pengujian Vulnerability Assessment yang dilakukan dengan pendekatan black box. Hal ini berarti bahwa pengujian tidak melibatkan analisis terhadap struktur internal sistem. Terhadap hasil Vulnerability Assessment (VA), Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menyampaikan risiko tersebut kepada pemilik aplikasi melalui pertemuan dengan perwakilan unit kerja.

w. Pengembangan, Pemeliharaan dan Integrasi Aplikasi

Berbagai aplikasi internal dan eksternal telah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem pusat, seperti *e-Registration*, *SIPT* dan sistem informasi pengawasan. Integrasi ini memperkuat interoperabilitas antar unit kerja dan antar instansi.

- 1) Pada bulan Mei 2025, kegiatan rapat terkait **SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)** dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada:

- **Kamis, 7 Mei 2025**
- **Selasa, 20 Mei 2025**
- **Senin, 19 Mei 2025**

Rapat ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi SIPT di lingkungan Badan POM. SIPT merupakan sistem yang dikembangkan untuk memperkuat pelaporan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja teknis di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rapat-rapat tersebut, beberapa agenda utama yang dibahas antara lain:

- a) Sinkronisasi data pelaporan dari unit-unit daerah ke pusat.
- b) Peningkatan akurasi dan kelengkapan laporan pengawasan melalui SIPT.
- c) Identifikasi kendala teknis dan administratif dalam penggunaan sistem.

- d) Penyusunan roadmap pengembangan lanjutan SIPT berbasis kebutuhan lapangan.
 - e) Sosialisasi pembaruan fitur dan pelatihan penggunaan aplikasi. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat integrasi data pengawasan nasional, meningkatkan efisiensi pelaporan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja Badan POM dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang lebih transparan dan terstruktur.
- 2) Sepanjang bulan Juni 2025, Badan POM melaksanakan sejumlah rapat dan kegiatan strategis dalam rangka mendukung pengembangan sistem informasi, pengawasan, serta koordinasi lintas sektor. Kegiatan rapat tersebut melibatkan berbagai unit kerja dan mitra eksternal, dengan rincian sebagai berikut:

Minggu Pertama (3–6 Juni 2025)

- 3 Juni:

Diadakan **desk konsultasi** bersama PT Kalbe (13.30 WIB) dan Johnson (10.00 WIB) guna membahas pengembangan kerja sama atau sistem yang terkait. Hari ini juga dilaksanakan **rapat New Aero**, terkait inisiatif baru yang sedang diujicoba.

- 4 Juni:

Diselenggarakan **Rapat Asrot**, yang kemungkinan membahas koordinasi pengawasan atau operasional teknis terkait distribusi produk.

Minggu Kedua (10–14 Juni 2025)

- 10 Juni:

Dilaksanakan **pembahasan pengembangan aplikasi ekspor impor**, yang penting untuk mendukung kelancaran proses perizinan dan pengawasan produk lintas negara.

- 12 Juni:

Kegiatan difokuskan pada **penyusunan timeline pengembangan SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu)** pada pagi hari, dan **penyusunan timeline pengembangan sistem penindakan** di siang hari.

- 13 Juni:

Tindak lanjut penyusunan dilakukan untuk memastikan kedua sistem memiliki roadmap dan tahapan implementasi yang terukur dan realistis.

Minggu Ketiga (16–20 Juni 2025)

- 16 Juni:

Rapat **SIPT CAPA** dilaksanakan, yang kemungkinan besar terkait dengan *Corrective and Preventive Actions* dalam pengelolaan pelaporan di SIPT.

- **19 Juni:**

Fokus kegiatan adalah **progres pengembangan sistem**, termasuk evaluasi hasil kerja sebelumnya dan pembahasan target lanjutan.

Minggu Keempat (24–27 Juni 2025)

- **24 Juni:**

Diadakan sesi **Live Chat**, yang bisa menjadi bagian dari sesi interaktif pelatihan atau konsultasi teknis.

- **26 Juni:**

Dijadwalkan **rapat bersama Bappenas**, menunjukkan adanya sinergi lintas kementerian/lembaga terkait kebijakan atau pengembangan aplikasi nasional.

x. **Monitoring dan Evaluasi**

Untuk memastikan implementasi SPBE berjalan sesuai target, Badan POM melakukan evaluasi berkala dan berpedoman pada arsitektur SPBE nasional serta indikator penilaian dari Kementerian PANRB.

y. **Audit Internal ISO 27001:2022**

Pelaksanaan audit internal ISO 27001:2022 merupakan bagian dari komitmen Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam menjaga sistem manajemen keamanan informasi. Audit ini dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh proses pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan POM. Kegiatan awareness ISO juga mendukung peningkatan pemahaman seluruh pegawai terhadap standar keamanan informasi yang berlaku secara internasional. Aplikasi yang masuk kedalam lingkup ISO 27001:2022 adalah Notifikos dan e-sertifikasi

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
12.183.419.000	11.637.790.837	95.52	100.44	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran **efisien** karena capaian indikator mencapai 100,44% dan realisasi anggaran mencapai 95.52% pada triwulan II. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran pada triwulan II tahun anggaran 2025 telah mendukung pencapaian indikator.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	1. Perlu dilakukan sosialisasi terkait standar pengembangan aplikasi dan standar infrastruktur karena masih ditemui adanya pengajuan pengembangan aplikasi dan alat pengolah data yang tidak sesuai dengan kebijakan, hal ini dapat disebabkan salahsatunya karena Kurangnya pemahaman unit kerja terkait standar Infrastruktur TIK & Aplikasi 2. Diperlukan Reviu dan Penyusunan SOP Mikro layanan SPBE belum lengkap dan terdokumentasi dengan baik. 3. Tekendalanya proses penetapan Kepka Arsitektur SPBE	1. Tidak tersedianya update terbaru sistem manajemen anti-penyuapan. 2. Kebijakan sistem belum disesuaikan dengan arah strategis organisasi. 3. Usulan APD tidak sesuai standar atau belum divalidasi. 4. SLA layanan TIK tidak jelas dan belum terdokumentasi. 5. Menunggu surat permohonan data dari KPI via Portal Satu Data 6. Kerjasama terkait MBG dengan BGN belum ada tindaklanjut, Anggaran terkait dukungan TIK BPOM terhadap pengawasan MBG belum tersedia 7. Draft Perjanjian Kerja Sama dengan BIN sudah di Biro Hukum BIN namun belum selesai disahkan	1. Kebijakan Manajemen Pengetahuan SPBE belum difinalisasi. 2. Kesiapan data dukung indeks SPBE belum optimal. 3. Masa berlaku sertifikat ISO 27001 akan habis. 4. Rancangan Kepka Arsitektur SPBE belum disahkan. 5. Sebagian aplikasi usulan tidak sesuai peta rencana SPBE. 6. Pendaftaran sistem elektronik belum lengkap. 7. Koordinasi teknis dengan BGN terkait sinergi MBG 8. Draft Perjanjian Kerja Sama dengan BIN sudah di Biro Hukum BIN namun belum selesai disahkan
Rekomendasi Perbaikan	1. Sosialisasi standar infrastruktur dan aplikasi SPBE secara langsung ke unit kerja dan UPT. 2. Penyelesaian dan pengesahan	1. Tinjauan manajemen ISO 37001 untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi audit. 2. Pembahasan konteks	1. Finalisasi dan distribusi kebijakan. 2. Lakukan assessment mandiri dan perbaikan data. 3. Audit internal ISO 27001.

	seluruh SOP Mikro. 3. Pelaksanaan awareness ISO 37001.	organisasi untuk penyalarsan. 3. Reviu pengajuan APD sesuai Standar Infrastruktur TIK. 4. Penyusunan dan penyesuaian SLA (termasuk RTO, RPO). 5. Mempercepat proses finalisasi dan pengesahan Draft Perjanjian Kerja Sama antara BPOM dan BIN untuk memperkuat koordinasi keamanan TIK dan persandian. 6. Pelaksanaan rapat koordinasi bersama BGN terkait Rakor Dukungan Data Kelompok Penerima Manfaat dan Penerima Manfaat Program Pemenuhan Gizi Nasional	4. Penyusunan materi Rakorpim, proses legal drafting. 5. Lakukan reviu teknis dengan unit pemilik aplikasi. 6. Percepat registrasi pejabat sistem elektronik. 7. Mempercepat proses finalisasi dan pengesahan Draft Perjanjian Kerja Sama antara BPOM dan BIN untuk memperkuat koordinasi keamanan TIK dan persandian. 8. Tindak lanjut hasil Koordinasi teknis dengan BGN terkait sinergi MBG
Rencana Aksi	1. Pelaksanaan sosialisasi Standar SPBE (Keputusan No 211/2024 dan 445/2023). 2. Reviu dan penomoran SOP Mikro, serta pengesahan oleh pejabat berwenang. 3. Kegiatan awareness ISO 37001:2016 kepada seluruh pegawai Pusdatin.	1. Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016. 2. Pembahasan konteks organisasi ISO 37001. 3. Verifikasi dan rekomendasi teknis atas pengadaan APD. 4. Penyusunan draft SLA layanan TIK. 5. Melakukan komunikasi lanjutan dan intensif dengan Biro Hukum BIN untuk mempercepat proses verifikasi,	1. Finalisasi dan pengiriman Nota Dinas ke unit penyusun. 2. Monev dan assessment mandiri SPBE. 3. Audit internal ISO 27001:2022. 4. Koordinasi legal drafting dan pematangan materi Rakorpim. 5. Reviu dan analisis pengajuan 36 aplikasi SPBE. 6. Pendaftaran 26 unit kerja di PSE Kominfo.

		dan pengesahan draft PKS. 6. Reviu dan Tim BCC dan Satu Data serta Monev implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM, Manajemen Data dan Layanan Data Terbuka	7. Melakukan komunikasi lanjutan dan intensif dengan Biro Hukum BIN untuk mempercepat proses verifikasi, dan pengesahan draft PKS. 8. Reviu dan Tim BCC dan Satu Data serta Monev implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM, Manajemen Data dan Layanan Data Terbuka
Kondisi sebelum rencana aksi	1. Sebagian unit kerja belum memahami standar teknis pengembangan aplikasi. 2. Tidak ada dokumen SOP Mikro resmi. 3. Sosialisasi belum dilakukan sejak audit eksternal sebelumnya.	1. Tidak ada update tindak lanjut sistem manajemen anti-penyuapan. 2. Dokumen konteks organisasi belum direvisi. 3. Banyak usulan APD tidak sesuai standar. 4. Belum tersedia SLA layanan 5. Draft Perjanjian Kerja Sama telah disampaikan dan berada di Biro Hukum BIN, namun belum memperoleh pengesahan atau tanggapan final. 6. Belum dilaksanakan perencanaan koordinasi terkait monev kegiatan SPLP,	1. Rancangan kebijakan masih dalam revisi. 2. Data dukung belum terupdate. 3. Belum dilakukan audit internal. 4. Draft masih di Biro Hukum 5. Belum ada analisis atau hasil reviu. 6. Belum ada pendaftaran unit kerja. 7. Draft Perjanjian Kerja Sama telah disampaikan dan berada di Biro Hukum BIN, namun belum memperoleh pengesahan atau tanggapan final.

		manajemen data dan layanan data terbuka	8. Belum dilaksanakan perencanaan koordinasi terkait monev kegiatan SPLP, manajemen data dan layanan data terbuka
Kondisi setelah rencana aksi	1. Pemahaman unit kerja terhadap Standar Infrastruktur TIK dan Aplikasi SPBE meningkat 2. Seluruh SOP Mikro layanan SPBE telah tersedia secara lengkap dan terdokumentasi 3. Pegawai Pusdatin memiliki pemahaman dasar terkait risiko praktik suap	1. Penerapan sistem manajemen anti-penyuapan mulai terpantau secara lebih terstruktur 2. Dokumen konteks organisasi telah diperbarui dan disesuaikan dengan arah strategis organisasi 3. Sebagian besar usulan pengadaan APD telah divalidasi dan direkomendasikan sesuai standar infrastruktur TIK 4. Draft SLA layanan TIK telah tersusun 5. Draft Perjanjian Kerja Sama masih belum selesai di Biro Hukum BIN 6. Telah dilaksanakan perencanaan koordinasi terkait monev kegiatan SPLP, manajemen data dan layanan data terbuka	1. Kebijakan Manajemen Pengetahuan SPBE telah difinalisasi dan didistribusikan 2. Data dukung indeks SPBE lebih lengkap dan akurat 3. Pelaksanaan audit internal ISO 27001 selesai tanpa temuan mayor/minor 4. Rancangan Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dalam proses final pengesahan 5. Sebagian besar aplikasi usulan telah dianalisis kesesuaiannya 6. 26 unit kerja BPOM telah teregistrasi dalam sistem PSE Kominfo 7. Draft Perjanjian Kerja Sama masih belum selesai di Biro Hukum BIN 8. Telah dilaksanakan perencanaan koordinasi terkait monev kegiatan SPLP, manajemen data dan layanan data terbuka

Timeline	April 2025	Agustus 2025	Triwulan III
Status	Telah dilaksanakan	Sebagian telah dilaksanakan dan beberapa masih dalam proses	Sebagian telah dilaksanakan dan beberapa masih dalam proses

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Sesuai dengan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2024 telah tercapai dengan capaian 110.48%. Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan pada akhir triwulan 2, realisasi Nilai Indeks SPBE telah dicapai sebesar 4,55. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan 2 sebesar 4,55 maka telah tercapai capaian kinerja 100.44%, dan mencapai kriteria “Sangat Baik”. Berdasarkan Hal tersebut maka pemanfaatan laporan Kinerja yang disusun setiap triwulan dapat membantu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan progres dalam pemenuhan target Indeks SPBE.

SASARAN 1

TERWUJUDNYA DATA DAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG ANDAL, REALTIME DAN TERINTEGRASI

PERSENTASE DATA DAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG ANDAL DAN TERINTEGRASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target triwulan II tahun 2025 pada Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada Triwulan ke IV.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi dan capaian pada indikator Persentase Data dan Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penerapan *Single Sign-On* (SSO) di lingkungan pemerintahan menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa faktor utama yang saling mendukung.

Pertama, **komitmen pimpinan dan dukungan regulasi** menjadi fondasi penting. Banyak instansi pemerintah mulai menyadari pentingnya integrasi sistem dan keamanan data, sehingga didorong adanya kebijakan digitalisasi layanan dan penguatan tata kelola TIK. Dukungan ini mempercepat proses implementasi SSO dan memastikan sumber daya yang dibutuhkan tersedia.

Kedua, **peningkatan infrastruktur dan kompetensi teknis** juga turut berkontribusi. Pemerintah telah melakukan penguatan jaringan, server, serta kemampuan teknis SDM melalui pelatihan dan kolaborasi antarinstansi. Hal ini memungkinkan pengelolaan akun pengguna secara lebih terpusat dan efisien.

Ketiga, **kesadaran keamanan siber** di kalangan pegawai semakin meningkat. Melalui pendekatan edukatif dan penerapan autentikasi ganda (multi-factor authentication), risiko kebocoran data akibat penggunaan banyak akun dan password yang lemah dapat diminimalkan.

Namun, di sisi lain, tantangan tetap ada, terutama dalam hal **interoperabilitas antar sistem lama (*legacy systems*)** dan koordinasi lintas unit. Banyak aplikasi yang dikembangkan secara terpisah oleh masing-masing instansi, sehingga integrasinya membutuhkan waktu dan penyesuaian.

Sebagai alternatif solusi, pemerintah telah melakukan beberapa langkah, seperti:

- a. **Penggunaan standar protokol terbuka** (seperti SAML dan OAuth) untuk memudahkan integrasi antar aplikasi.
- b. **Pembangunan platform identitas digital nasional** yang terpusat, sehingga memudahkan pengelolaan akses lintas layanan.
- c. **Penerapan dashboard monitoring** untuk melihat efektivitas penggunaan SSO secara real-time dan mengidentifikasi kendala lebih cepat.

Secara keseluruhan, keberhasilan SSO di lingkungan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara kebijakan, teknologi, dan kesiapan organisasi. Dengan terus memperbaiki koordinasi dan investasi berkelanjutan dalam bidang keamanan dan integrasi, penerapan SSO diprediksi akan semakin optimal dan menjadi pilar utama dalam transformasi digital birokrasi.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk memastikan keberhasilan implementasi SSO (Single Sign-On) di lingkungan pemerintahan, dibutuhkan serangkaian program dan kegiatan yang saling menunjang satu sama lain. SSO adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan hanya dengan satu kali proses login. Agar sistem ini berjalan efektif dan mendukung pencapaian kinerja pemerintahan secara menyeluruh, maka perencanaan dan pelaksanaannya harus dirancang dengan matang dan terintegrasi.

Pertama, kegiatan **pemetaan aplikasi dan pengguna** menjadi dasar yang penting. Pemerintah perlu mengidentifikasi sistem-sistem yang akan terintegrasi dalam skema SSO, termasuk siapa saja pengguna utamanya dan bagaimana alur aksesnya. Tanpa pemetaan yang jelas, integrasi SSO bisa menjadi tidak efisien dan menimbulkan kerumitan teknis.

Selanjutnya, perlu dilakukan **standarisasi dan interoperabilitas sistem**. Program ini mencakup penyesuaian teknologi dan protokol keamanan agar semua aplikasi yang terhubung bisa saling berkomunikasi dengan baik melalui SSO. Misalnya, penyesuaian sistem autentikasi menggunakan protokol yang umum seperti OAuth2 atau SAML.

Program penting lainnya adalah **peningkatan kapasitas SDM** melalui pelatihan teknis dan sosialisasi kepada pengguna. Teknologi secanggih apa pun tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang memahami cara kerja dan manfaat SSO. Oleh karena itu, pelatihan bagi pengelola sistem dan edukasi bagi pengguna akhir sangat diperlukan.

Tak kalah penting, kegiatan **penyusunan kebijakan dan pedoman teknis** juga menunjang keberhasilan implementasi SSO. Pemerintah perlu menetapkan regulasi internal yang mengatur tentang penggunaan, keamanan data, hak

akses, dan penanganan insiden. Pedoman ini akan menjadi acuan teknis dan administratif dalam penerapan SSO secara terstandar.

Terakhir, program **monitoring dan evaluasi berkala** diperlukan untuk menilai sejauh mana SSO telah memberikan dampak terhadap efisiensi dan keamanan layanan digital pemerintahan. Melalui evaluasi ini, instansi dapat terus melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dan hasil analisis yang obyektif.

Dengan menjalankan program-program tersebut secara sinergis, perencanaan dan implementasi SSO di pemerintahan dapat mendukung pencapaian kinerja secara lebih efisien, aman, dan terintegrasi.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
4.690.083.000	1.440.341.300	30.71	-	Tidak Efisien

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	-	Menunggu dilakukan <i>Proof Of Concept</i> (POC) SSO aplikasi BPOM oleh Peruri	Menunggu <i>Feedback</i> API dari Peruri
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	1. Telah dilakukan sharing knowledge/ Update teknologi SSO menggunakan Keycloak antara PUSDATIN dengan PT. Digitama dan PT. DVS 2. Telah dilakukan visitasi ke PT.	Telah dilaksanakan rapat pembahasan penyusunan MOU Antara PUSDATIN dengan PERURI	1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan persiapan POC 2. Telah mengisi Formulir integrasi Peruri ID SSO 3. Telah mengisi form pernyataan kerahasiaan SBU digital

Keterangan	April	Mei	Juni
	Peruri terkait update Teknologi SSO dengan Inapas dan inagov		
Kondisi sebelum rencana aksi	Belum adanya spesifikasi kebutuhan dalam pengembangan dan integrasi portal SSO	Belum dilakukan uji coba integrasi antara aplikasi BPOM dengan inapas	Belum adanya pemilihan aplikasi sebagai POC dengan Inapas
Kondisi setelah rencana aksi	1. Pengumpulan spesifikasi kebutuhan dalam pengembangan dan integrasi portal SSO 2. Pembuatan portal SSO dan integrasi aplikasi dalam proses bisnis sesuai arsitektur SPBE	Dilakukan Pembahasan terkait aplikasi yang akan dilakukan uji coba SSO	Pelaksanaan Proof Of Concept SSO terhadap Aplikasi ADP, EMAIL, BCC
Timeline	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun
Status	Masih Proses	Masih Proses	Masih Proses

SASARAN 1

TERWUJUDNYA DATA DAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG ANDAL, REALTIME DAN TERINTEGRASI

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana *Grand Design* RB 2025 – 2045 dan Roadmap RB 2025 – 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan**. Sehingga untuk capaian kinerja IPS tahun 2025 menggunakan **hasil resmi EPSS tahun 2024**.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Untuk itu realisasi triwulan ini belum dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	3,04	-	-
2024	-	2,61	-	-

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2025. Telah dilakukan penilaian IPS tahun 2023 – 2024, namun belum ada target yang ditentukan untuk indikator ini dikarenakan IPS belum menjadi IKU Pusdatin pada tahun 2023-2024.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mendukung implementasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial maka dilakukan persiapan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Dalam pelaksanaan Pusdatin melibatkan Tim Penilai Internal EPSS BPOM yang diwakilkan oleh unit kerja yang mendukung penilaian untuk setiap indikator. Adanya Surat Keputusan Tim Penilai Internal EPSS BPOM merupakan salah satu bentuk komitmen unit kerja dalam mendukung BPOM meraih Indeks Pembangunan Statistik yang optimal. Selain itu adanya koordinasi yang baik bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selaku pembina statistik BPOM tahun 2025 menjadi salah satu penyebab keberhasilan indikator ini.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa kegiatan, antara lain:

- Telah dilakukan pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tahun 2025 pada tanggal 02 Mei 2025 terkait Pembahasan Prinsip Satu Data Indonesia, 05 Mei 2025 terkait Pembahasan Proses Bisnis Statistik, 07 Mei 2025 terkait Pembahasan Kualitas Data, 14 Mei 2025 terkait Pembahasan Kelembagaan, 19 Mei 2025 terkait Pembahasan Sistem Statistik Nasional dan 26 Mei 2025 terkait Pembahasan Standar Data dan Analisis.
- Telah dilakukan penyusunan metadata statistik terhadap data prioritas Persentase Sediaan Farmasi Aman dan Bermutu, Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu, Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu, dan Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
927.876.0000	566.888.150	61.10	-	Tidak Efisien

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	1. Pembinaan EPSS yang akan diselenggara	Belum adanya penetapan Data Prioritas sehingga belum dilakukan penyusunan	Terdapatnya kendala dalam penyusunan metadata statistik dikarenakan kurang pemahamannya

Keterangan	April	Mei	Juni
	kan pada Bulan Mei 2. Belum adanya penetapan Data Prioritas sehingga belum dilakukan standar data dan metadata statistik yang baru	metadata yang baru	produsen data dalam penyusunan metadata statistik tersebut.
Rekomendasi Perbaikan	1. Pelaksanaan progres penyusunan data prioritas 2. Pelaksanaan pembinaan statistik bersama BPS	Pelaksanaan progres penyusunan data prioritas	Pelaksanaan metadata <i>coaching clinic</i> bersama BPS, walidata dan produsen data.
Rencana Aksi	1. Rapat pembinaan yang diselenggarakan oleh pembina dari BPS (Dit. PMSS) 2. Rapat pembahasan EPSS bersama unit kerja produsen data dan Tim Penilai Internal EPSS BPOM		
Kondisi sebelum rencana aksi	Penetapan SK Tim Penilaian Internal EPSS BPOM	Koordinasi dengan tim sekretariat Satu Data Indonesia terkait penyusunan data prioritas	Diskusi dengan produsen data terkait daftar data prioritas tahun 2025
Kondisi setelah rencana aksi	Telah dilakukan pembahasan mengenai Satu Data Indonesia bersama Bappenas	1. Telah Terlaksananya pembinaan yang diselenggarakan oleh pembina dari BPS (Dit. PMSS) bersama Tim TPI EPSS BPOM untuk setiap domain penyusun EPSS. 2. Telah dilakukan pembinaan standar data	1. Telah terlaksananya rangkaian Workshop Gotong Royong Data (WGRD) terhadap data prioritas 2025 2. Telah dilakukan pengusulan, reviu, penajaman dan konfirmasi daftar indikatif bersama produsen data BPOM dan Bappenas. 3. Progress pembahasan dan penyusunan metadata telah

Keterangan	April	Mei	Juni
		statistik nasional oleh BPS	dilakukan dengan produsen data sebesar 40%. Dimana indikator yang telah disusun yaitu Persentase Sediaan Farmasi Aman dan Bermutu, Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu, Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu, dan Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu
Timeline	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
Status	Belum Selesai	Belum Selesai	Belum Selesai

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja yang disusun setiap triwulan membantu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan demi tercapainya target Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Laporan Kinerja setiap triwulan menunjukkan progres dalam mendapat IPS. Selanjutnya dilaksanakan pertemuan dengan produsen data untuk melakukan penyusunan standar data statistik, metadata statistik.

SASARAN 2

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH YANG OPTIMAL PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NILAI PEMBANGUNAN ZI PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target triwulan II tahun 2025 pada Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada Triwulan ke IV.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh Inspektorat.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	79.2	78.18	98.71%	Baik
2022	80.2	71.47	89.11%	Belum memenuhi ekspektasi
2023	81.2	83.76	103.15%	Sangat baik
2024	86.1	86.31	100.24%	Sangat baik

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB. Penilaian akan dilakukan pada triwulan IV 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pusdatin tahun 2024 telah melaksanakan perbaikan Reformasi Birokrasi yang hasilnya sudah diterima di TW 4 2024 dengan hasil meningkat dari tahun sebelumnya. Penyebab kegagalan di tahun sebelumnya adalah kurangnya pemahaman dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dalam koridor Reformasi Birokrasi. Dalam upaya perbaikan terus menerus Pusdatin telah menyusun rencana aksi kerja yang dimonitor setiap triwulan. Pada Triwulan II ini pelaksanaan rencana aksi sebagai berikut:

- Membangun kanal pengaduan berkadar pengawasan
- Melakukan sosialisasi sistem layanan *help* Pusdatin
- Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dalam upaya pemahaman Reformasi Birokrasi bagi seluruh karyawan Pusdatin
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ZI tahun 2024

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Faktor yang menjadi penunjang keberhasilan dalam pembangunan Zona Integritas menuju dalam WBK/WBBM adalah pemahaman yang baik bagi segenap unsur pelaksana kegiatan dan juga komitmen pimpinan sebagai role model dan komitmen seluruh pelaksana kegiatan. Keberhasilan ini dapat dicapai dengan melakukan sosialisasi ke seluruh unsur Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan sehingga menghasilkan pemahaman yang baik dan membangun komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari Pusdatin.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
130.590.000	57.939.000	44.37%	-	Tidak Efisien

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Layanan <i>help</i> pusdain belum sesuai dengan standar manajemen layanan	-	Belum adanya kanal pengaduan berkadar pengawasan
Rekomendasi Perbaikan	- Penyesuaian layanan <i>help</i> pusdatin - reuiu kebijakan standar layanan	-	Membangun kanal pengaduan berkadar pengawasan
Rencana Aksi	- Melakukan penyesuaian sistem <i>help</i> Pusdatin - Melakukan reuiu kebijakan standar layanan	-	Membangun kanal pengaduan berkadar pengawasan pada layanan <i>help</i> Pusdatin
Kondisi sebelum rencana aksi	- layanan <i>help</i> Pusdatin belum sesuai dengan standar manajemen layanan - terdapat standar layanan yang belum terupate	-	Belum terdapat kanal pengaduan berkadar pengawasan
Kondisi setelah rencana aksi	- <i>Help</i> Pusdatin sudah sesuai dengan standar manajemen layanan - Kebijakan standar layanan sudah terupdate - Dilakukan pelatihan kepada pengguna layanan <i>help</i> pusdatin	-	Kanal pengaduan telah tersedia pada layanan <i>help</i> Pusdatin

Keterangan	April	Mei	Juni
Timeline	Triwulan II	-	Triwulan II
Status	Close	-	Close

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2024 telah tercapai dengan capaian 110.24%. Namun demikian masih memerlukan beberapa perbaikan dan perbaikan tersebut dimonitoring setiap triwulan.

SASARAN 2

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH YANG OPTIMAL PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NILAI AKIP PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target Triwulan II Tahun 2025 pada indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerja baru dapat dilihat pada Triwulan IV.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh APIP/Inspektorat.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	81.9	79.42	96.97%	Baik
2022	84.4	81.00	95.97	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	86.9	83.80	96.43	Cukup
2024	84	81.87	97.46	Cukup

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Penilaian akan dilakukan pada triwulan IV 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, Pusdatin memperoleh nilai AKIP sebesar 81,87, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut, adapun rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2024 antara lain:

- a. Melaksanakan seluruh tahapan penyesuaian perencanaan kinerja pada periode selanjutnya sesuai pedoman implementasi SAKIP di BPOM dan Melengkapi seluruh dokumen pendukung terkait perubahan RAPK periode selanjutnya (jika ada).
- b. Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja.
- c. Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yg memadai, tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun juga memanfaatkan hasil kajian atas kendala/hambatan serta data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja.

- d. Melengkapi dokumen apabila terdapat perubahan target dengan menyertakan justifikasi hasil analisa komprehensif termasuk dokumen kertas kerja dasar perhitungannya, sebagai bukti bahwa perubahan target telah melalui pemahasan dengan pimpinan unit.
- e. Menyempurnakan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang sudah dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai pedoman implementasi SAKIP di BPOM
- f. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal untuk menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan taget kinerja yang belum tercapai.
- g. Menyusun, mengesahkan dan menyampaikan LEI sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman SAKIP BPOM.
- h. Mendokumentasikan seluruh bukti implementasi terhadap kebijakan pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
- i. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap termasuk penyajian informasi terkait kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.
- j. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen pelaporan kinerja.
- k. Melengkapi hasil perhitungan efisiensi Sasaran Strategis maupun IKU dengan analisa yang komprehensif menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan, dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi penggunaan anggaran/SDM secara lebih optimal.
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras.
- m. Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi SIMETRIS dan pelaporan kinerja lainnya untuk dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.
- n. Mengoptimalkan peran Tim Pengelola SAKIP di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makan dengan melaksanakan pengembangan kompetensi terkait implemementasi SAKIP melalui sosialisasi/bimtek/pelatihan terkait SAKIP

dengan harapan tim SAKIP dapat mendukung implementasi SAKIP Satker secara menyeluruh.

- o. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Utama, agar dapat mendukung upaya perbaikan kinerja dan implementasi SAKIP pada periode selanjutnya.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari APIP, pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan beberapa upaya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi AKIP 2024 sebagai berikut:

- 1) Dikarenakan terdapat penyesuaian target untuk indikator Indeks Nilai SPBE maka terjadi perubahan RAPK dan Pusdatin telah melengkapi dokumen pendukung terkait perubahan RAPK tersebut.
- 2) Penyesuaian Manual IKU yang dilengkapi dengan Informasi terkait Kode Indikator kinerja, tabel data (baseline dan target), penjelasan terkait tata cara perhitungan sesuai karakteristik pada masing-masing IKU.
- 3) Pembahasan awal terkait revisi SOP pengumpulan Kinerja
- 4) Penyusunan SK *Reward and Punishment* 2025
- 5) Pengembangan Kompetensi Tim SAKIP
- 6) Pimpinan Unit Kerja sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) telah terlibat dan berperan aktif dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal, hal ini telah didokumentasikan pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I 2025. Kemudian dalam Laporan Evaluasi Internal Triwulan I 2025 telah menyajikan data capaian kinerja per bulan mengacu pada breakdown target pada RAPK. Pada triwulan I tahun 2025 juga telah disusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dan laporan Tahunan Tahun 2024.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target Nilai AKIP antara lain:

- a. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin (setiap bulan) membahas semua capaian IKU, kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti serta realisasi anggaran pada satker Pusdatin;
- b. Mengikuti bimtek SAKIP dan monev online, serta bimtek Renstra;
- c. Mengikuti rapat kerja nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- d. Dokumen perencanaan telah selesai disusun yaitu :
 - 1) Perjanjian Kinerja
 - 2) Penetapan MPH
 - 3) SK Renstra 2025-2029
 - 4) SK IKU
 - 5) SK Penanggung Jawab Data
 - 6) Draft Renstra Pusdatin
 - 7) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
 - 8) Pengusulan anggaran tambahan untuk pagu indikatif tahun 2026
 - 9) Penyusunan SWOT Pusdatin untuk Rancangan Renstra BPOM 2025-2029

10)Manual IKU dan Kertas Kerja Indeks SPBE, SSO dan Indeks Pembangunan Statistik

11)Revisi RAPK

e. Dokumen pelaporan telah selesai disusun yaitu:

1) Laporan Kinerja 2024

2) Laporan Tahunan 2024

3) Lapkin Interim TW 1

4) Laporan evaluasi TW 1

5) Masukan terhadap Laporan Tahunan BPOM 2024

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
148.193.000	148.192.500	100	-	Tidak Efektif

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	-
Kondisi setelah rencana aksi	-	-	-
Timeline	-	-	-
Status	-	-	-

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa terdapat penurunan nilai AKIP yang cukup signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Sehingga Pusdatin perlu menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi SAKIP 2024, agar dapat meningkatkan nilai AKIP pada Tahun 2025.

SASARAN 2

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH YANG OPTIMAL

PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NILAI KINERJA ANGGARAN PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target triwulan II tahun 2025 pada Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada Triwulan ke IV.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	93	87.07	93.62%	Baik
2022	93.6	91.83	98.11%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	94.8	89.41	94.31%	Cukup
2024	90.25	99.38	110.11%	Sangat Baik

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2025 belum dilakukan penilaian oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dan akan dilakukan penilaian pada triwulan IV 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan II Tahun 2025 belum dapat didefinisikan, hal ini dikarenakan nilai kinerja perencanaan anggaran (salah satu indikator pembentuk NKA) dirilis di akhir tahun.

Namun dalam mendukung peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran maka dilakukan pengelolaan keuangan yang baik serta disesuaikan dengan seluruh target indikator pada penilaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Indikator tersebut diantaranya:

- a. NK Perencanaan Anggaran
 - Capaian RO
 - Penggunaan SBK
 - Efisiensi SBK
- b. NK Pelaksanaan Anggaran
 - Revisi DIPA

- Deviasi Hal III DIPA
- Penyerapan Anggaran
- Belanja Kontraktual
- Penyelesaian Tagihan
- Pengelolaan UP dan TUP
- Capaian Output

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2025 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan target-target indikator pada penilaian IKPA, penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun eksternal (KPPN Jakarta VI dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI).

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
9.798.721.000	5.748.035.674	58.66	-	Tidak Efektif

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	-	Pada Indikator UP dan TUP mengalami penurunan nilai karena: 1. Penyampaian SPM GUP ke-7 melebihi batas waktu dari selisih hari dari SPM GUP sebelumnya 2. Penggunaan KKP yang belum sesuai target TW II sebesar Rp.48.000.000 namun hanya terealisasi Rp.9.758.160	Penggunaan KKP belum sesuai target, dimana target triwulan II adalah 48.000.000 namun baru terealisasi 36.964.462
Rekomendasi Perbaikan		Memperhatikan batas waktu Revolving UP	Peningkatan penggunaan KKP sesuai dengan target triwulan
Rencana Aksi	1. Melakukan reviu penyerapan	1. Melakukan reviu penyerapan	1. Melakukan reviu penyerapan

Keterangan	April	Mei	Juni
	anggaran satker setiap bulan 2. Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan 3. Melaksanakan kegiatan dan pencairan dana pada SBKU Layanan BMN untuk memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA 4. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu	anggaran satker setiap bulan 2. Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan 3. Melaksanakan kegiatan dan pencairan dana pada SBKU Layanan BMN untuk memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA 4. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu	anggaran satker setiap bulan 2. Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan 3. Melaksanakan kegiatan dan pencairan dana pada SBKU Layanan BMN untuk memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA 4. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu
Kondisi sebelum rencana aksi	1. Reviu Penyerapan Anggaran dilakukan per triwulan 2. Rencana penarikan dana belum disesuaikan dengan kegiatan kontraktual, sehingga deviasi masih tinggi 3. Belum dilakukan tagging SBKU	1. Reviu Penyerapan Anggaran dilakukan per triwulan 2. Rencana penarikan dana belum disesuaikan dengan kegiatan kontraktual, sehingga deviasi masih tinggi 3. Belum dilakukan tagging SBKU	4. Reviu Penyerapan Anggaran dilakukan per triwulan 5. Rencana penarikan dana belum disesuaikan dengan kegiatan kontraktual, sehingga deviasi masih tinggi 6. Belum dilakukan tagging SBKU
Kondisi setelah rencana aksi	1. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran berjalan sesuai jadwal dan rencana penarikan	1. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran berjalan sesuai jadwal dan rencana penarikan dana yang telah ditentukan	4. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran berjalan sesuai jadwal dan rencana penarikan dana

Keterangan	April	Mei	Juni
	dana yang telah ditentukan 2. Deviasi rencana penarikan dana setiap bulan dibawah 5%, sehingga nilai IKPA meningkat. 3. Efisiensi meningkat melalui pelaksanaan kegiatan tagging SBKU layanan BMN	2. Deviasi rencana penarikan dana setiap bulan dibawah 5%, sehingga nilai IKPA meningkat. 3. Efisiensi meningkat melalui pelaksanaan kegiatan tagging SBKU layanan BMN	yang telah ditentukan 5. Deviasi rencana penarikan dana setiap bulan dibawah 5%, sehingga nilai IKPA meningkat. 6. Efisiensi meningkat melalui pelaksanaan kegiatan tagging SBKU layanan BMN
Timeline	31 Desember 2025	31 Desember 2025	31 Desember 2025
Status	Dalam pelaksanaan	Dalam pelaksanaan	Dalam pelaksanaan

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2024 telah tercapai dengan capaian 110.11%. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran pada setiap triwulan belum memenuhi target nasional yang ditetapkan Kementerian Keuangan
- Pemanfaatan KKP belum digunakan dengan maksimal

Pemanfaatan laporan kinerja dilakukan dan berguna sebagai pengukuran nilai kinerja anggaran terhadap target yang telah dicantumkan pada reviu renstra Pusdatin. Selain itu nilai kinerja anggaran juga dapat merepresentasikan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan capaian yang optimal di lingkungan Pusdatin.

SASARAN 2

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH YANG OPTIMAL PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

INDEKS MANAJEMEN RISIKO PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target triwulan II tahun 2025 pada Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada Triwulan ke IV.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh Inspektorat.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	-	2.625	-	-
2022	-	2.875	-	-
2023	-	2.938	-	-
2024	-	2.906	-	-

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Penilaian akan dilakukan pada triwulan IV 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Nilai Kinerja Manajemen risiko pada triwulan II Tahun 2025 belum dapat didefinisikan dikarenakan pengukuran capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun. Namun untuk mendukung peningkatan maturitas manajemen risiko di Pusdatin telah dilakukan upaya perbaikan terhadap hasil penilaian dari inspektorat

- Pelaporan manajemen risiko dilakukan tepat waktu sesuai dengan timeline yang diberikan oleh inspektorat yaitu tanggal 20 Januari 2025.
- Telah dilakukan reviu terhadap daftar risiko Pusdatin tahun 2024 sesuai dengan hasil penilaian dari inspektorat.
- Telah dilakukan reviu terhadap daftar risiko Pusdatin tahun 2025 triwulan 1.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mendukung peningkatan maturitas manajemen risiko di lingkungan Pusdatin pada TW II telah dilaksanakan Reviu dan Finalisasi Daftar Risiko oleh

tim pengelola manajemen risiko di lingkungan Pusdatin tahun 2025. Daftar risiko Semester II tahun 2025 yang telah difinalisasi disosialisasikan kepada seluruh pegawai pusdatin, sebagai *awareness* dan meningkatkan kepedulian pegawai untuk risiko yang dimiliki Pusdatin. Risiko yang sudah difinalisasi rencananya akan di submit pada aplikasi SAPA APIP di bulan Juli (TW 3).

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
34.250.000	31.280.000	91.33	-	Tidak Efektif

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan	- Perlu dilakukan reviu resiko semester 1 berdasarkan SOP serta isu internal dan eksternal yang dimiliki - Perlu dilakukan Reviu Daftar Risiko Semester 1 untuk penyusunan Daftar Risiko Semester 2	Perlu dilakukan pembahasan finalisasi daftar Risiko Semester 2 pada pada Rapat Tinjauan Manajemen Pusdatin	Perlu dilakukan Sosialisasi IKU, daftar Risiko dan pengendaliannya kepada Seluruh Pegawai Pusdatin
Rencana Aksi	- Melakukan reviu resiko Pusdatin berdasarkan SOP serta isu internal dan eksternal yang dimiliki - Melakukan Reviu Daftar Risiko Semester 1 untuk penyusunan	Melakukan pembahasan finalisasi daftar Risiko Semester 2 pada pada Rapat Tinjauan Manajemen Pusdatin	Melakukan Sosialisasi IKU, daftar Risiko dan pengendaliannya kepada Seluruh Pegawai Pusdatin

Keterangan	April	Mei	Juni
	Daftar Risiko Semester 2		
Kondisi sebelum rencana aksi	Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 adalah 2,906 dengan tingkat maturitas Risk Aware		
Kondisi setelah rencana aksi	1. Sudah dilakukan reviu resiko semester 1 berdasarkan SOP serta isu internal dan eksternal yang dimiliki 2. Melakukan Reviu Daftar Risiko Semester 1 untuk penyusunan Daftar Risiko Semester 2	Sudah dilakukan pembahasan finalisasi daftar Risiko Semester 2 pada pada Rapat Tinjauan Manajemen Pusdatin	Telah disosialisasi IKU, daftar Risiko dan pengendaliannya kepada Seluruh Pegawai Pusdatin
Timeline	April 2025	Mei 2025	Juni 2025
Status	Rekomendasi telah ditindaklanjuti		

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja yang disusun setiap triwulan membantu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan demi tercapainya target Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi. Laporan Kinerja setiap triwulan menunjukkan progres dalam mendapat Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi. Selanjutnya dilaksanakan pertemuan dengan produsen data untuk melakukan penyusunan standar data statistik, metadata statistik.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1.	Nilai Indeks SPBE	1. Hasil Indeks SPBE BPOM pada tahun 2024 adalah 4,53 2. Telah dilakukan reviu terhadap Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang menghasilkan rancangan Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2024. 3. Telah disusun rancangan SOP Makro dan Mikro sebagai pedoman implementasi arsitektur dan peta rencana SPBE BPOM	1. Reviu Kebijakan/Pedoman/Standar terkait TIK 2. Pemenuhan Standar ISO Series 3. Reviu Permohonan Alat Pengolah Data sesuai Standar Infrastruktur TIK 4. Reviu Inisiasi Proyek Pengembangan Aplikasi sesuai Peta Rencana SPBE 5. Reviu dan Penetapan SK Tim Satu Data BPOM 2025 6. Reviu dan Penetapan SK Tim BCC 2025 7. Monev implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM TW 2 8. Monev Manajemen Data TW 2 9. Monev Penggunaan Layanan Data terbuka TW 2 10. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) TW 2 11. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) TW 2 12. Koordinasi dengan Komdigi terkait persiapan	Akhir Tahun	1. Reviu dan Penetapan SK Tim Satu Data BPOM 2025 2. Reviu dan Penetapan SK Tim BCC 2025 3. Monev implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM TW 2 4. Monev Manajemen Data TW 2 5. Monev Penggunaan Layanan Data terbuka TW 2 6. Telah ditetapkan SK Tim Koordinasi, Asesor, dan Arsitektur SPBE BPOM Tahun 2025 7. Telah ditetapkannya Kepka Arsitektur SPBE 8. Sosialisasi dan Awareness ISO 9. Reviu Permohonan Alat Pengolah Data sesuai Standar	1. Belum ditetapkan Kepka Manajemen Pengetahuan SPBE 2. Reviu Kepka Manajemen Keamanan SPBE 3. Reviu Kepka Standar Pengembangan dan Pembangunan aplikasi, Reviu Kepka standar Infrastruktur TIK 4. Sosialisasi Kepka Standar Pengembangan dan Pembangunan aplikasi dan Standar Infrastruktur TIK kepada seluruh unit teknis dan UPT di BPOM 5. Belum terlaksananya Koordinasi teknis dengan BPJPH,	TW IV 2025	1. Telah dilakukan review SK Tim Koordinasi Satu Data Tahun 2025. 2. Telah dilakukan review SK Tim Koordinasi BCC Tahun 2025 3. Telah dilaksanakan koordinasi lintas sektor dan monitoring serta evaluasi terkait SPLP, Manajemen Data dan layanan terbuka yang melibatkan internal dan eksternal BPOM 4. Telah diakukan monev Manajemen Data di TW 2 5. Telah dilakukan monev penggunaan layanan data terbuka di TW 2 6. Telah ditetapkan SK Tim Koordinasi, Asesor, dan Arsitektur SPBE BPOM Tahun 2025 7. Telah ditetapkannya Kepka Arsitektur SPBE 8. Telah dilakukan analisa dan reviu terhadap inisiasi proyek TW 1 sebanyak 12 aplikasi dan TW 2 24 Aplikasi 9. Telah dilaksanakan reviu

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
			penggunaan PDN Jawa Barat 13. Pengembangan aplikasi sesuai dengan hasil revidu peta rencana SPBE (Maret-Desember) 14. Pemeliharaan aplikasi sesuai dengan peta rencana SPBE (Setiap Bulan) 15. Monev tindak lanjut manajemen layanan SPBE pada aplikasi ITSM (Setiap Triwulan) 16. Revidu SOP Keamanan TIK dan Persandian Tahun 2025 17. Monitoring dan Evaluasi Hasil Vulnerability Assessment 18. Koordinasi Tim Penanganan Kerentanan - Tim Tanggap Insiden Siber Nasional dengan BSSN		Infrastruktur TIK 10. Revidu Inisiasi Proyek Pengembangan Aplikasi sesuai Peta Rencana SPBE 11. Revidu Rancangan SOP SPBE 12. Sosialisasi Kepka Standar Pengembangan dan Pembangunan aplikasi dan Standar Infrastruktur TIK kepada seluruh unit teknis dan UPT di BPOM 13. Pemeliharaan aplikasi sesuai dengan peta rencana SPBE April, Mei, Juni 14. Monev tindak lanjut manajemen layanan SPBE pada aplikasi ITSM TW 2 15. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) TW 1 16. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra	BGN sebagai salah satu bentuk penggunaan layanan data terbuka 6. Belum dilakukan koordinasi dengan KOMDIGI terkait persiapan penggunaan PDN Jawa Barat 7. Draft Perjanjian Kerja Sama dengan BIN sudah di Biro Hukum BIN namun belum selesai disahkan		dan rekomendasi permohonan APD pada 6 permohonan oleh unit kerja 10. Telah dilaksanakan awareness ISO 27001:2022 dan ISO 37001:2016 11. Telah dilakukan pembahasan bersama Biro Hukor dan revidu terhadap rancangan SOP Makro dan Mikro terkait layanan SPBE di BPOM 12. Telah dilaksanakannya Sosialisasi Kepka Standar Pengembangan dan Pembangunan aplikasi dan Standar Infrastruktur TIK kepada seluruh unit teknis dan UPT di BPOM 13. Telah dilaksanakannya Audit Internal ISO 27001:2022 14. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan PDN di Triwulan 1 15. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
					Pemerintah (JIP) TW 1 17. Monitoring dan Evaluasi Hasil Vulnerability Assessment 18. Koordinasi Tim Penanganan Kerentanan - Tim Tanggap Insiden Siber Nasional dengan BSSN			terhadap pemanfaatan JIP di triwulan 1 16. Telah dilakukan Pemeliharaan aplikasi sesuai dengan peta rencana SPBE April, Mei, Juni 17. Telah dilakukan Monev tindak lanjut manajemen layanan SPBE pada aplikasi ITSM TW 2 18. Telah dilakukan Pengembangan modul2 secara bertahap terhadap aplikasi sesuai dengan hasil reuiu peta rencana SPBE 19. Proses Draft Perjanjian Kerja Sama diselesaikan Biro Hukum BIN
2	Persen-tase Data dan Sistem Informasi Pengawa san Sediaan Farmasi	Belum adanya akses terpusat untuk akun dan akses ke dalam aplikasi yang terintegrasi di Badan POM untuk internal dan eksternal	Rencana Aksi TW 2 : 1. Penyusunan Spesifikasi Kebutuhan 2. Penyusunan Draft Kerjasama 3. Melakukan Uji Coba/ POC SSO	Akhir Tahun	Telah dilakukan uji coba / POC otentifikasi SSO menggunakan Peruri ID pada Aplikasi Penindakan	Pembuatan portal sso dan integrasi aplikasi dalam proses bisnis sesuai arsitektur spbe	Akhir Tahun	Telah dilakukan uji coba / POC otentifikasi SSO menggunakan Peruri ID pada Aplikasi Penindakan,

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
	dan Pangan Olahan yang andal dan terinte-grasi	(pelaku usaha)						
3	Indeks Pem-bangunan Statistik (IPS)	Hasil Indeks Pembangunan Statistik (IPS) BPOM pada tahun 2024 adalah 2,61 Telah dilakukan reviu terhadap rekomendasi penilaian IPS tahun 2024	<u>Rencana Aksi Triwulan 2:</u> 1. Rapat pembinaan yang diselenggarakan oleh pembina dari BPS (Dit. PMSS) 2. Rapat pembahasan EPSS bersama unit kerja produsen data dan Tim Penilai Internal EPSS BPOM	Akhir Tahun	1. Pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan bersama pembina data statistik Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dan Tim Penilai Internal EPSS BPOM 2. Pembinaan standar data statistik bersama BPS 3. Pembahasan data prioritas tahun 2025 bersama produsen data dan Bappenas 4. Penyusunan Metadata statistik terhadap beberapa data prioritas	1. Penetapan data prioritas tahun 2024 2. Penyusunan standar data statistik	Akhir Tahun	1. Telah dilakukan pembinaan statistik sektoral bersama pembina 2. Telah dilakukan pembahasan pengajuan daftar data indikatif untuk data prioritas tahun 2025 bersama produsen data dan Sekretariat SDI 3. Telah dilakukan penyusunan metadata statistik sebesar 40% terhadap beberapa data prioritas yaitu Persentase Sediaan Farmasi Aman dan Bermutu, Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu, Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu, dan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
								Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu
4	Nilai Pem-bangunan ZI Pusat Data dan Informasi	Nilai Pembangunan ZI pada Tahun 2024 adalah: 86,31	<u>Rencana Aksi Triwulan 2:</u> 1. Penyusunan Dokumen Manrisk 2. Sosialisasi dan Internalisasi Elektronisasi layanan Ketata Usahaan 3. Penyusunan Pedoman Pengujian Keamanan 4. Laporan monitoring dan evaluasi WBS	Akhir Tahun	1. Dilakukan pertemuan pembahasan Rapat Sosialisasi Standar Pengembangan Aplikasi SPBE dan Standar Infrastruktur TIK kepada seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM (30 April 2025) 2. Internalisasi Manajemen Risiko pada tanggal 23 April 2025 3. Sosialisasi kepada seluruh pengguna help pusdatin pada layanan TIK tanggal 15 Mei 2025 4. Dilakukan pertemuan pembahasan Rapat Koordinasi	-	Akhir Tahun	1. Rapat Sosialisasi Standar Pengembangan Aplikasi SPBE dan Standar Infrastruktur TIK kepada seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM pada tanggal 30 April 2025 2. Internalisasi Manajemen Risiko pada tanggal 23 April 2025 3. Sosialisasi kepada seluruh pengguna help pusdatin pada layanan TIK tanggal 15 Mei 2025 4. Dilakukan pertemuan pembahasan Rapat Koordinasi Dukungan Data Kelompok Penerima dan Penerima Manfaat MBG yang diselenggarakan di Hotel Aloft South

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
					Dukungan Data Kelompok Penerima dan Penerima Manfaat MBG yang diselenggarakan di Hotel Aloft South Jakarta. Pada tanggal 04 Juni 2025 5. Rapat Pembahasan Standard Layanan Pusdatin pada tanggal 19 Juni 2025 6. Sosialisasi peraturan BPOM no 8 tahun 2022 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai BPOM tanggal 23 Juni 2025 7. Sosialisasi Benturan Kepentingan,WBS(<i>Whistleblowing system</i>), gratifikasi dan anti korupsi dalam mendukung zona integritas menuju WBK dan			Jakarta. Pada tanggal 04 Juni 2025 5. Rapat Pembahasan Standard Layanan Pusdatin pada tanggal 19 Juni 2025 6. Sosialisasi peraturan BPOM no 8 tahun 2022 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai BPOM tanggal 23 Juni 2025 7. Sosialisasi Benturan Kepentingan,WBS (<i>Whistleblowing system</i>), gratifikasi dan anti korupsi dalam mendukung zona integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pusdatin BPOM tahun 2025 pada tanggal 23 Juni 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
					WBBM di Lingkungan Pusdatin BPOM tahun 2025 pada tanggal 23 Juni 2025			
5	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	Nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP adalah 81,87. Capaian nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 84 (97,46%)	1. Melakukan reviu terhadap keselarasan antara perencanaan,pengukuran kinerja dengan melengkapi kertas kerja, dan memastikan pelaporan dan Evaluasi Kinerja. 2. Melakukan pembahasan rekomendasi dan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan bersama dengan inspektorat.	Akhir Tahun	1. Dikarenakan terdapat penyesuaian target untuk indidikator indeks Nilai SPBE maka terjadi perubahan RAPK dan Pusdatin telah melengkapi dokumen pendukung terkait perubahan RAPK tersebut. 2. Penyesuaian manual IKU yang dilengkapi dengan informasi terkait Kode Indikator kinerja, tabel data (baseline dan target), penjelasan terkait tata cara perhitungan sesuai karakteristik pada masing-masing	1. Melaksanakan seluruh tahapan penyesuaian perencanaan kinerja sesuai dengan pedoman implementasi SAKIP BPOM 2. Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi internal 3. Menyempurnakan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja 4. Mengoptimalkan reviu berjenjang terhadap	Akhir Tahun	1. Dikarenakan terdapat penyesuaian target untuk indidikator indeks Nilai SPBE maka terjadi perubahan RAPK dan Pusdatin telah melengkapi dokumen pendukung terkait perubahan RAPK tersebut. 2. Penyesuaian manual IKU yang dilengkapi dengan informasi terkait Kode Indikator kinerja, tabel data (baseline dan target), penjelasan terkait tata cara perhitungan sesuai karakteristik pada masing-masing IKU. 3. Pembahasan awal terkait revisi SOP pengumpulan Kinerja 4. Penyusunan SK

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
					IKU. 3. Pembahasan awal terkait revisi SOP pengumpulan Kinerja 4. Penyusunan SK reward and Punishment 2025 5. Pengembangan Kompetensi Tim SAKIP 6. Pimpinan Unit Kerja sebagai pengambil keputusan (decision maker) telah terlibat dan berperan aktif dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal, hal ini telah didokumentasikan pada laporan Evaluasi Internal triwulan I 2025 7. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I 2025 telah menyajikan data	penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen pelaporan kinerja. 5. Memastikan seluruh proses tindak lanjut hasil evaluasi AKIP 2024		reward and Punishment 2025 5. Pengembangan Kompetensi Tim SAKIP 6. Pimpinan Unit Kerja sebagai pengambil keputusan (decision maker) telah terlibat dan berperan aktif dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal, hal ini telah didokumentasikan pada laporan Evaluasi Internal triwulan I 2025 7. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I 2025 telah menyajikan data capaian kinerja per bulan mengacu pada breakdown target pada RAPK 8. Pada Triwulan I tahun 2025 juga telah disusun Laporan Kinerja tahun 2024 dan Laporan Tahunan 2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
					capaian kinerja per bulan mengacu pada breakdown target pada RAPK 8. Pada Triwulan I tahun 2025 juga telah disusun Laporan Kinerja tahun 2024 dan Laporan Tahunan 2024			
6	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi pada Tahun 2024 adalah: 99,37	1. Melakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan 2. Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan 3. Melaksanakan kegiatan dan pencairan dana pada SBKU Layanan BMN untuk memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA 4. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu	Akhir Tahun	1. Melakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan 2. Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan. 3. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu	1. Berkonsultasi dengan pihak KPPN mengenai penginputan capaian output dan melakukan pemantauan berkala pada aplikasi SAKTI 2. Melaksanakan kegiatan dan pencairan dana pada SBKU Layanan BMN untuk memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA	Akhir Tahun	1. Telah dilakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan 2. Telah dilakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan. 3. Telah dilakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
7	Indeks Manaje- men Risiko Pusat Data dan Informasi	Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 adalah 2,906 dengan tingkat maturitas <i>Risk Aware</i>	Input daftar Risiko semseter II pada aplikasi SAPA APIP	Akhir Tahun	1. Telah tersusunnya SK Manajemen Risiko 2025 2. Sharing knowladge dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 3. Refreshmen manajemen risiko bersama dengan konsultan Ahli 4. Refreshment lanjutan dengan mengidentifikasi kembali risiko di masing-masing fungsi Pusdatin yang dilaksanakan bersama dengan konsultan Ahli 5. Melakukan reviu resiko Pusdatin berdasarkan SOP serta isu internal dan eksternal yang dimiliki 6. Melakukan Reviu Daftar Risiko Semester 1 untuk penyusunan Daftar Risiko Semester 2	1. Mereviu kembali daftar risiko yang telah disusun dan melakukan penilaian dan penanganan terhadap risiko tersebut 2. Menginpukan kembali ke SAPA APIP untuk daftar risiko yang telah di reviu	Akhir Tahun	1. Telah di susun dan di sahkan SK manajemen risiko tahun 2025 2. Melakukan Sharing knowledge dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 bersama Tim Inspektorat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 3. Melaksanakan Melaksanakan refreshmen manajemen risiko bersama dengan konsultan Ahli yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 4. Melaksanan refreshment lanjutan dengan mengidentifikasi kembali risiko di masing-masing fungsi Pusdatin yang dilaksanakan bersama dengan konsultan Ahli pada tanggal 11 Maret 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
					7. Finalisasi daftar Risiko Semester 2 pada pada Rapat Tinjauan Manajemen Pusdatin 8. Sosialisasi IKU, daftar Risiko dan pengendaliannya kepada Seluruh Pegawai Pusdatin			5. Melakukan reviu resiko Pusdatin berdasarkan SOP serta isu internal dan eksternal yang dimiliki 6. Melakukan Reviu Daftar Risiko Semester 1 untuk penyusunan Daftar Risiko Semester 2 7. Finalisasi daftar Risiko Semester 2 pada pada Rapat Tinjauan Manajemen Pusdatin 8. Sosialisasi IKU, daftar Risiko dan pengendaliannya kepada Seluruh Pegawai Pusdatin

3.3 Realisasi Anggaran

- a. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran).

Target		Realisasi		Persentase	
Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
27	44.521.934.000	27	19.630.467.461	70.16%	44.09%

- b. Realisasi anggaran per Sasaran, yang meliputi:
- Sasaran Strategis untuk level BPOM;
 - Saran Program untuk Satker level Eselon I; dan
 - Sasaran Kegiatan untuk Satker Pusat (Eselon II) dan UPT.
- c. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Anggaran	% Capaian Sasaran Kegiatan	Tingkat Efisiensi	Kategori
1.	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realte dan Terintegrasi	24,38%	36%	75%	Efisien
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Optimal Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	52,61%	18,75%	75%	Efisien

BAB IV PENUTUP

Pada Tahun 2025 Pusdatin memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 7 (Tujuh) IKU. Hingga Triwulan II Tahun 2025 dari pagu anggaran sebesar Rp.44.521.934.000 telah terealisasi sebesar Rp.19.630.467.461 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 44,09% dan persentase realisasi fisik sebesar 70,16%. Dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

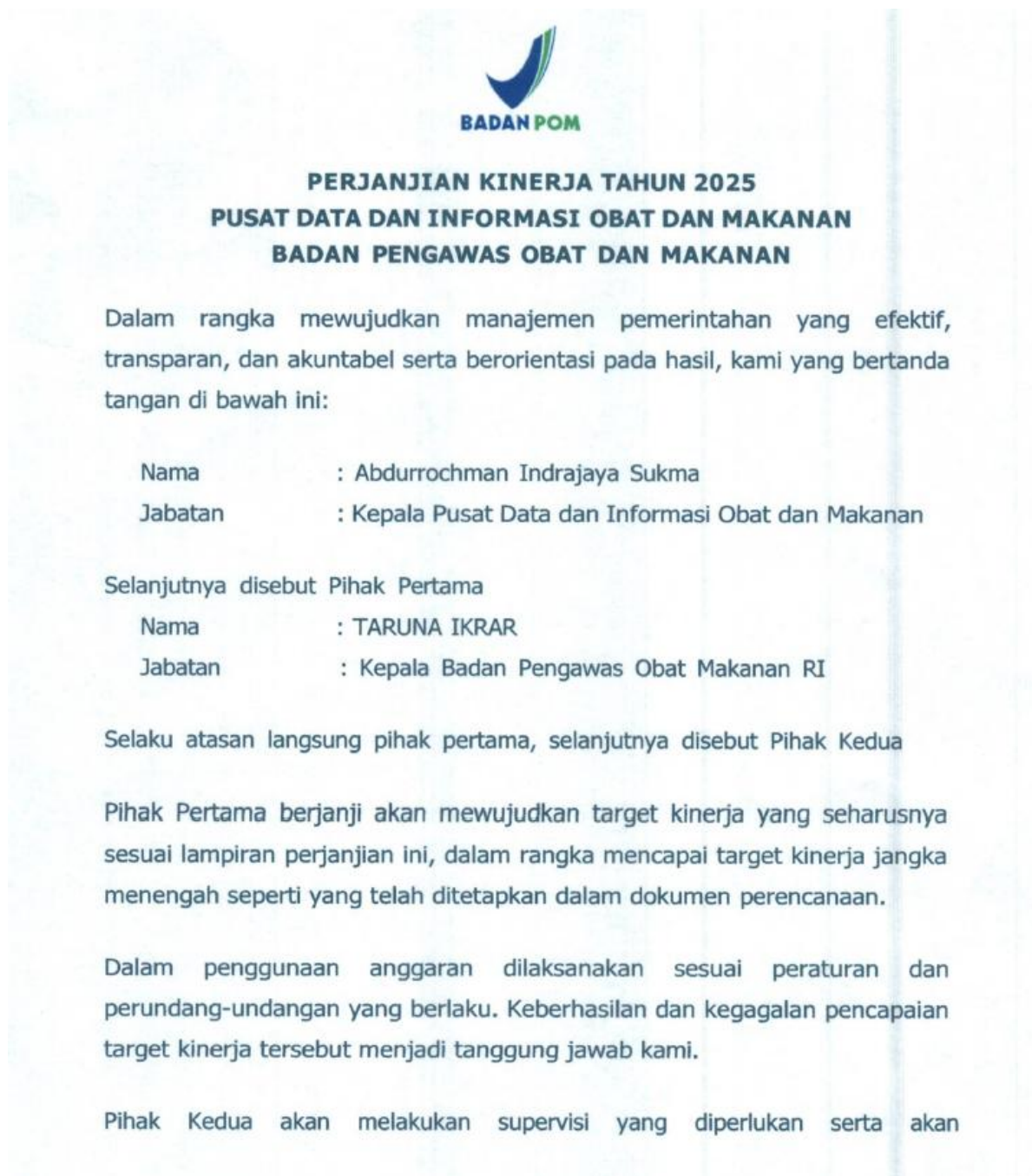
1. 1 (Satu) indikator kinerja dengan kriteria **ISTIMEWA** yaitu Nilai Indeks SPBE
2. 6 (Enam) indikator kinerja yang **BELUM DAPAT DITENTUKAN** kriterianya yaitu:
 - 1) Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi
 - 2) Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
 - 3) Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi
 - 4) Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
 - 5) Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi
 - 6) Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi

Selama pelaksanaan TW II 2025 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menemui beberapa hambatan serta telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

No	Hambatan	Tindak Lanjut
1	Koordinasi teknis dengan BGN terkait sinergi MBG	a. Tindak lanjut permohonan data KPI b. Kick off meeting Lisensi Otomasi Data Agent c. Finalisasi data prioritas BPOM TA 2025
2	Draft Perjanjian Kerja Sama dengan BIN sudah di Biro Hukum BIN namun belum selesai disahkan	Koordinasi dengan staf BIN untuk mengetahui progres penyelesaian Surat Perjanjian Kerja Sama dengan BIN
3	Proses pengesahan Rancangan Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE terhambat karena sesuai arahan Kepala BPOM bahwa perlu dilakukan pendalaman materi terkait Rancangan Kepka tersebut.	Dilakukan koordinasi dan penjadwalan dengan Tu Pimpinan untuk melakukan rakorpim terkait Rancangan Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE - Rencana dilakukan bulan Juni atau Juli 2025
4	Menunggu Feedback API dari Peruri untuk proses POC SSO	Pelaksanaan Proof Of Concept SSO terhadap Aplikasi ADP, EMAIL, BCC
5	Penggunaan KKP belum sesuai target, dimana target triwulan II adalah 48.000.000 namun baru terealisasi 36.964.462	Memaksimalkan penggunaan KKP di bulan-bulan selanjutnya

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA



melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama

Kepala Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengawas
Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE	4.59 Nilai
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20 %
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.8 Nilai
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97.47 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 44.521.934.000 (Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	44.521.934.000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama

Kepala Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI



TARUNA IKRAR

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE												4.59	25,785,944,000
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi												20	4,934,400,000
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												2.8	2,266,266,000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi												86.52	106,533,000
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi												81.88	1,194,498,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi												97.47	10,082,714,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi												2.94	151,578,000
Total														44,521,934,000	

JAKARTA, 12 February 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA - REVISI

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE			4.53			4.53			4.53			4.59	25.785.944.000
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi												20	4.934.400.000
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												2.8	2.266.266.000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan Zi Pusat Data dan Informasi												86.52	106.533.000
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi												81.88	1.194.499.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi												97.47	10.082.714.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi												2.94	151.578.000
Total															44.521.934.000

Jakarta, 15 April 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom, M.Kom